



EKONOMI MAKRO

Leo Fernando Simatupang, SE, MM

EKONOMI MAKRO

Leo Fernando Simatupang,SE,MM



EKONOMI MAKRO

Penulis:

Leo Fernando Simatupang, SE, MM

Editor:

Siska Anggita Situmeang, S.Pd, M.Pd

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Oktober 2023

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
; 21 x 29 cm
ISBN : 978-623-448-677-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB 1. RUANG LINGKUP ANALISIS MAKRO EKONOMI	1
BAB 2. KONSEP PENDAPATAN NASIONAL DAN PENGHITUNGAN PDB	19
BAB 3. KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TERTUTUP	37
BAB 4. KESEIMBANGAN AD-AS	49
BAB 5. UANG DAN INSTITUSI KEUANGAN	67
BAB 6. PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG	83
BAB 7. KESEIMBANGAN PASAR BARANG DAN UANG	98
BAB 8. KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TERBUKA	124
BAB 9. PENGANGGURAN	137
BAB 10. KEBIJAKAN PEMERINTAH	155
DAFTAR PUSTAKA	166

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku Ajar mata Kuliah “Ekonomi Makro”, dengan harapan buku ini dapat dipergunakan bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah Ekonomi Makro dan pihak lain yang ingin menggunakannya, baik sebagai bahan kuliah, penelitian, ataupun bahan kepustakaan

Ekonomi Makro merupakan bagian dari Ilmu Ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian hubungan-hubungan kausal yang ingin dipelajari oleh Ekonomi Makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antar variabel-variabel ekonomi agregatif.

Variabel-variabel ekonomi agregatif yang banyak dipersoalkan dalam Ekonomi Makro antara lain ialah: tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stok kapital nasional, utang pemerintah.

Akhir kata, penulis menyadari buku ajar ini yaitu Ekonomi Makro masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik, saran-saran dan komentar pembaca yang berguna untuk penyempurnaan buku teks ini, sangat penulis harapkan. Untuk itu sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih.

Pematangsiantar, 6 Oktober 2023

Leo Fernando Simatupang,SE,MM

BAB 1

RUANG LINGKUP ANALISIS MAKRO EKONOMI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah selesai menyelesaikan materi pada bab 1, mahasiswa mampumembedakan konsep dan ruang lingkup teori mikro ekonomi dan makro ekonomi.

B. URAIAN MATERI

1. Ruang Lingkup Mikro dan Makro Ekonomi

Mengapa kita perlu belajar ekonomi? Hal tersebut sudah pernah dibahas didalam mikro ekonomi. Timbulnya ekonomi adalah karena adanya pilihan-pilihan dalam memproduksi dan menggunakan barang atau jasa dimana terjadi kelangkaan sehingga bernilai ekonomis. Jadi bisa dikatakan ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari terkait dengan pilihan-pilihan dalam mengoptimalkan kemampuannya dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai kepuasan maksimum. Sedangkan ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Yang dibicarakan bukan lagi bagian-bagian dalam suatu perekonomian atau hanya perusahaan saja, namun sudah membicarakan kegiatan ekonomi menyeluruh dalam perekonomian.

Mikro ekonomi sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari perilaku dari unit-unit ekonomi kecil yang bersifat perorangan seperti perilaku dari rumah tangga, perilaku perusahaan dan perilaku dari sektor industri yang ada. Meskipun ekonomi mikro dan ekonomi makro memiliki hubungan yang erat dan berkaitan serta berjalan sejalan, namun kedua bagian ini umumnya diajarkan terpisah. Ilmu ekonomi sendiri tidak bisa dipisahkan dari Adam Smith, semenjak ditulisnya sebuah buku yang berjudul " An Inquiry Into The Mature and Causes of The Wealth of Nations (The Wealth of Nations) di tahun 1776.

Kajian Adam Smith melihat adanya reaksi-reaksi terhadap kegagalan tradisi ekonomi dimana disana dijelaskan timbulnya suatu resesi, pengangguran, kemiskinan, dan masalah kegagalan proses pembangunan ekonomi. Dalam kajian tersebut kedudukan negara atau pemerintah sebagai regulator perekonomian sangat menonjol, dan saat ini kebijakan yang dibuat disuatu negara dilakukann didominasi oleh kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh suatu negara.

Semua kajian tersebut bersumber dari Keynes. Tapi menurut Karya dan Syamsuddin (2016) hal tersebut terjadi salah penafsiran. Seharusnya negara/pemerintah hanyalah salah satu aktor ekonomi yang memegang cukup penting kedudukannya dalam menghasilkan regulasi untuk mengatasi masalah-masalah dan beban sosial akibat perubahan ekonomi yang terjadi.

Sebelum mengetahui perbedaan mikro dan makro ekonomi, perlu juga mengetahui beberapa permasalahan ekonomi makro. Sekitar tahun 1980-an perekonomian dunia mengalami tingkat pengangguran dan inflasi yang tinggi, bahkan negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, dan Indonesia, saat itu sudah mengalami krisis moneter dan krisis ekonomi. Namun masalah tersebut bukan masalah baru, beberapa tahun sebelumnya sudah pernah juga terjadi, seperti di tahun 1930-an dunia mengalami tingkat pengangguran yang tinggi dan sangat berdampak luas kepada negara. Lalu tahun 1940-an inflasi mulai berkembang dan menggantikan posisi tekanan pengangguran dan deflasi.

Akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an serta menjelang akhir abad ke - 20 yaitu tahun 1980-an perekonomian mengalami lagi tingkat pengangguran yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang lamban, defisit neraca pembayaran internasional dan disertai inflasi yang tinggi.

Indonesia mengalami tingkat inflasi yang paling parah pada tahun 1966 dengan kenaikan hingga 600% dalam satu tahun (Suparmoko & Sofilda : 2014). Lalu tahun 1980 an perubahan terjadi hanya sedikit. Tahun 1990-an tingkat inflasi merendah sekitar 10% lalu kembali meningkat lagi mencapai 80% per tahun pada 1998.

Kemudian sekitar tahun 1982 Indonesia menghadapi laju pertumbuhan yang lamban. Saat itu industri minyak sangat suram, ditambah krisis moneter dan krisis ekonomi tahun 1997-1998 perekonomian Indonesia merosot sekitar 14% lalu membaik di tahun 2000 dan tahun 2009 pertumbuhan Indonesia mulai ditargetkan tumbuh 6%. Walau kenyataannya hingga saat ini tahun 2019 hanya mampu tumbuh sekitar 5,3%.

Atau yang kita lihat saat ini, menurut Kementrian koordinator bidang Perekonomian Republik Indonesia (2019), berbagai negara mengalami ketidakpastian ekonomi. Ekonomi global tertekan, kecuali Amerika Serikat yang mampu tumbuh sekitar 2.9% karena adanya ekspansi fiskal dan peningkatan investasi, negara-negara maju seperti kawasan EURO (1,8%), Jepang (0,8%) dan Tiongkok (6.6%). Sedangkan pertumbuhan negara-negara berkembang lebih rendah daripada ekspektasi akibat adanya penurunan dalam permintaan negara industri. Sehingga beberapa negara berkembang memfokuskan pada kestabilan mata uangnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, bisa dilihat secara luas lingkup makro dan mikro ekonomi memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan yang ada pada mikro ekonomi adalah mikroekonomi lebih menitikberatkan pada analisis dalam mewujudkan efisiensi ketika menggunakan sumber dayanya dan bagaimana caranya agar rumah tangga atau perusahaan atau sektor industri mampu mencapai kepuasan yang optimal. Berdasarkan hal tersebut unit-unit pelaku ekonomi tadi menganalisis masalah yang ada dengan membuat berbagai pilihan-pilihan.

Selanjutnya perbedaan yang dapat kita lihat pada makroekonomi adalah makroekonomi lebih menganalisis tentang pertama, bagaimana peranan dari sisi permintaan dan penawaran yang dapat mempengaruhi tingkat kegiatan suatu perekonomian. Kedua, makroekonomi menganalisis permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di setiap perekonomian. Yang terakhir, makroekonomi akan melihat bagaimana peranan dan campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi tersebut.

2. Isu- Isu Utama Dalam Analisis Makro Ekonomi

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, analisis-analisis dalam teori makroekonomi berbeda dari pandangan yang menganggap bahwa faktor-faktor produksi atau sumber-sumber yang dimiliki masyarakat adalah terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Maka masyarakat haruslah membuat pilihan-pilihan. Kegiatan memilih ini perlu dibedakan kepada dua aspek, yaitu:

- a. Dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, dan
- b. Dalam kegiatan menggunakan barang dan jasa.

Masalah memilih tersebut dianalisis dalam teori mikroekonomi dengan mengemukakan tiga pertanyaan :

WHAT : Apakah jenis-jenis barang dan jasa yang harus diproduksi ?

HOW : Bagaimana caranya memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut ?

FOR WHOM : Untuk siapakah berbagai barang dan jasa tersebut diproduksi ?

a. Menentukan Jenis Barang yang perlu diproduksi

Pertanyaan pertama, yaitu apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi merupakan persoalan yang akan menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam perekonomian. Dengan kata lain, pilihan para konsumen (pembeli) merupakan faktor penting dalam menentukan jenis-jenis kegiatan memproduksi yang harus dijalankan. Analisis mengenai interaksi di antara produsen dan konsumen (penjual dan pembeli) diterangkan dalam teori penawaran & permintaan. Hal ini diterangkan lebih detail dalam teori perilaku konsumen.

b. Menentukan Cara Memproduksi Yang Paling Efisien

Untuk mewujudkan barang dan jasa diperlukan faktor-faktor produksi yang sering dinamakan juga sebagai sumber-sumber daya atau resources. Faktor produksi yang tersedia dalam setiap perekonomian terbatas jumlahnya dan memerlukan biaya atau pengorbanan untuk memperolehnya. Dengan kata lain, sebelum menjalankan kegiatan memproduksi, setiap pengusaha harus menyelesaikan persoalan kedua yang dinyatakan sebelum ini : Bagaimanakah caranya memproduksi barang yang akan dijualnya untuk memenuhi kebutuhan para konsumen ? analisis- analisis dalam teori makroekonomi yang menerangkan tentang teori produksi (fungsi produksi), biaya produksi dan struktur pasar (dan penentuan harga dan jumlah produksi diberbagai pasar) bertujuan untuk menerangkan bagaimana seorang produsen memecahkan persoalan tersebut. Hal ini banyak dibahas dalam teori biaya produksi, teori produksi dan struktur pasar.

c. Untuk Siapa Barang Akan Diproduksi ?

Setelah mengetahui jenis-jenis faktor produksi yang dibutuhkannya untuk melakukan kegiatan memproduksi, produsen akan pergi ke pasar faktor untuk mendapatkan faktor-faktor produksi yang diperlukannya. Sifat interaksi di antara para pengusaha (pembeli faktor produksi) dan rumah tangga (pemilik faktor produksi) dalam pasaran faktor diterangkan dalam teori distribusi, teori ini menerangkan tentang (i) sifat umum dari interaksi di antara pengguna dan penjual faktor produksi di pasaran faktor, dan (ii) caranya berbagai pendapatan faktor produksi (upah, sewa, bunga dan keuntungan) di tentukan pasar.

Sebagai akibat dari penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang di butuhkan masyarakat ,akan tercipta aliran pendapatan faktor-faktor

produksi yang digunakan. Aliran ini akan menentukan corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Selanjutnya corak distribusi pendapatan ini akan menentukan corak permintaan masyarakat keatas barang dan jasa. Dengan demikian, aliran-pendapatan yang berlaku sebagai akibat kegiatan memproduksi barang dan jasa akan dapat memecahkan persoalan :Untuk siapakah barang dan jasa perlu diproduksi?.

3. Asal Mula Perkembangan Analisis Makro Ekonomi

Teori makroekonomi menunjukkan bahwa teori tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sesuatu perekonomian berfungsi dan menjalankan kegiatannya. Teori tersebut pada hakikatnya menerangkan bagaimana sesuatu masyarakat yang :

- a. Memiliki faktor-faktor produksi yang terbatas.
 - b. Mempunyai keinginan memperoleh barang dan jasa yang tidak terbatas, membuat pilihan-pilihan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa sebagai kepuasan dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.
- a. Isu-Isu Yang Tidak Diliputi Teori Mikroekonomi

Analisis mikroekonomi ternyata tidak dapat menerangkan beberapa masalah penting yang ada atau terjadi dalam perekonomian :

- 1) Faktor-faktor apakah yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu Negara dalam suatu periode ?
- 2) Mengapa setiap Negara menghadapi masalah pengangguran, yang adakalanya semakin lama semakin memburuk keadaanya ?
- 3) Mengapa masalah kenaikan harga-harga berlaku, yang sering kali juga diikuti oleh masalah pengangguran yang cukup serius ?
- 4) Mengapa berbagai perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepatnya ?
- 5) Mengapa kegiatan perekonomian tidak mengalami perkembangan yang stabil, yaitu adakalanya ia cepat berkembang, tetapi pada periode lain ia mengalami perkembangan yang lambat atau kemunduran ?

Analisis mikroekonomi tidak dapat menerangkan permasalahan yang dihadapi perekonomian sebab ahli ekonomi klasik tidak membahas masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lesu.

b. Sejarah Munculnya Ekonomi Makro

Ekonomi mikro khususnya teori harga, banyak menyerap perhatian ahli-ahli ekonomi sebelum tahun 1930-an. Para ahli ekonomi klasik beranggapan bahwa kesempatan kerja penuh selalu dapat dicapai orang tidak banyak memperhatikan kondisi ekonomi secara makro. Yang hanya diperhatikan adalah beberapa produksi yang dihasilkan dan bagaimana agar perusahaan mendapat laba sebanyak mungkin. Jika kesempatan penuh tercapai maka bisa dikatakan produksi selalu tetap atau tidak banyak berubah, khususnya dalam jangka pendek. Karena produksi total atau nasional selalu tetap, maka para ahli ekonomi memusatkan perhatiannya hanya pada aspek mikro ekonomi saja.

Adam Smith dalam bukunya : "The Wealth of Nation (1776)" dimana beliau merupakan bapak ilmu ekonomi, telah mempengaruhi banyak ahli ekonomi politik, filsafat dan pembuat kebijakan terkait bekerjanya perusahaan swasta sesuai dengan ekonomi pasar dan tanpa campur tangan pemerintah, sistem ini dianggap sebagai sistem yang terbaik. Mekanisme pasar sebagai "invisible hand" melukiskan bagaimana kepentingan pribadi diterjemahkan oleh mekanisme pasar menjadi suatu hasil bagi seluruh bangsa atau seluruh negara secara efisien. Menurut kaum Klasik tidak diperlukan lagi adanya suatu lembaga tertentu yang harus memperhatikan perekonomian secara agregat.

Para ekonom klasik percaya pada pentingnya peranan kebebasan individu, tapi bukan berarti meniadakan sama sekali peranan pemerintah. Diakui pula oleh para ekonom klasik pemerintah masih memiliki peranan penting pada sektor publik. Peran yang paling utama adalah pemerintah harus menata struktur kelembagaan seperti hak pemilikan, sistem kontrak, pencegahan timbulnya kekuatan monopoli dan sebagainya. Peran yang kedua, pemerintah harus menyediakan barang publik seperti pertahanan nasional, pekerjaan umum seperti jalan raya dan pelabuhan, serta pendidikan dan kesehatan. Secara umum mereka menganggap bahwa pemerintah justru dapat mengganggu mesin pertumbuhan ekonomi yang ada di sektor swasta didukung oleh hak penguasaan individu dan persaingan pasar.

Sebagai implikasi dari model klasik adalah:

- 1) Selalu terdapat kesempatan kerja penuh
- 2) Permintaan agregat tidak mempunyai pengaruh terhadap jumlah produksi dan kesempatan kerja
- 3) Penawaran merupakan kunci pertumbuhan ekonomi
- 4) Inflasi merupakan akibat dari kebijakan otoritas moneter

c. Perkembangan Teori Makroekonomi

Dalam tahun 1929- 1932 terjadi kemunduran ekonomi diseluruh dunia, yangbermulai dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Periode ini dinamakan the Great Depression. Pada puncak kemerosotan ekonomi itu, seperempat tenaga kerja di USA menganggur dan pendapatan nasionalnya mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Ketidakmampuan tersebut mendorong seorang ahli ekonomi Inggris yang terkenal pada masa tersebut, yaitu John Maynard Keynes, mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan kepada teori makroekonomi modern. Padangan tersebut dikemukakan dalam buku yang berjudul The general Theory Of Employment, Interest And Money pada tahun 1936.

d. Tujuan Kebijakan Makro

Teori ekonomi mencoba menjelaskan mengapa berbagai masalah timbul dalam perekonomian dan bagaimana masalah-masalah tersebut diselesaikan. Oleh karena itu teori ekonomi makro secara umum mendorong timbulnya kebijaksanaan ekonomi makro. Maka menurut (Suparmoko & Sofilda : 2016) terdapat beberapa tujuan utama setiap perekonomian meliputi empat hal:

- 1) Mencapai dan mempertahankan kesempatan kerja penuh
- 2) Mempertahankan stabilitas harga
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- 4) Mencapai keseimbangan Neraca Pembayaran Internasional.

4. Isu Utama Dalam Analisis Makro Ekonomi

a. Penentuan Kegiatan Ekonomi

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan yang akan dicapai seusatu perekonomian merupakan bagian terpenting dari analisis makroekonomi. Analisis tersebut menunjukkan bagaimana pengeluaran agregat (permintaan agregat) dan penawaran agregat akan menentukan tingkat kegiatan sesuatu perekonomian dalam satu periode tertentu dan pendapatan nasional/produksi nasional yang tercipta. Dalam suatu perekonomian modern komponen dari pengeluaran agregat dibedakan menjadi :

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga
- 2) Investasi perusahaan
- 3) Pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan

4) Ekspor (pembelian barang dalam negeri oleh penduduk Negara lain).

Analisis mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi dalam perekonomian dibedakan dalam tiga bentuk abstraksi / penyederhanaan :

- 1) Analisis penentuan kegiatan perekonomian : Asumsi tingkat bunga tetap dan tingkat harga tetap. Model : 2 Sektor ; 3 Sektor ; 4 Sektor ;
- 2) Analisis penentuan kegiatan perekonomian : Asumsi Tingkat bunga berubah dan tingkat harga tetap.
- 3) Analisis penentuan kegiatan perekonomian : Asumsi tingkat bunga berubah dan tingkat harga berubah ~> Agregat Demand dan Agregat Supply.

b. Masalah dan Kebijakan Makroekonomi

Masalah makro ekonomi yang dihadapi menurut Sukirno (2017: 9) adalah :

- 1) Pengangguran
- 2) Inflasi
- 3) Pertumbuhan ekonomi
- 4) Ketidakstabilan neraca perdagangan dan pembayaran.

Sedangkan kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan fiskal, moneter dan dari segi penawaran.

5. Masalah Utama Dalam Perekonomian

Masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi suatu Negara.

Masalah tersebut adalah :

- a. Masalah pertumbuhan ekonomi.
- b. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi.
- c. Masalah pengangguran.
- d. Masalah kenaikan harga (inflasi).
- e. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai : perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat disebabkan

karena faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. Jika membicarakan pertumbuhan maka yang diperhatikan adalah produksi fisik harus meningkat. Misalnya industri sepatu meningkat, produksi jasa meningkat, produksi beras meningkat, dan lain-lain. Menurut (Suparmoko & Sofilda : 2016) ada dua kekuatan yang mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan faktor produksi baik itu tenaga kerja maupun kapital, dan adanya peningkatan efisiensi dalam produksi karena perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, perbaikan pengetahuan, keterampilan dan lainnya.

7. Masalah Ketidakstabilan Kegiatan Ekonomi

Ketidakstabilan ekonomi merupakan perekonomian yang mengalami gejolak perubahan harga barang. Apabila harga barang tidak stabil, akan mengganggu jalannya kegiatan perekonomian. Baik itu pengusaha, produsen, maupun konsumen itu sendiri. Apabila terjadi kenaikan harga yang terus menerus tentu para pelaku ekonomi tersebut akan ada yang mendapatkan keuntungan namun ada juga yang dirugikan. Namun, secara umum kenaikan harga yang terjadi terus menerus akan menghancurkan suatu perekonomian negara dimana barang dan jasa yang tersediakan menjadi semakin sedikit. (Suparmoko & Sofilda : 2016)

8. Masalah Pengangguran

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak ingin bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai contoh, ibu rumah tangga yang tidak ingin bekerja karena ingin mengurus keluarganya tidak tergolong sebagai penganggur. Seorang anak orang kaya yang tidak mau bekerja karena gajinya lebih rendah dari yang diinginkannya juga tidak tergolong sebagai penganggur. Ibu rumah tangga dan anak orang kaya tadi disebut penganggur sukarela.

a. Sebab Berlakunya Pengangguran

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang & jasa dengan maksud mencari keuntungan. Keuntungan

tersebut hanya diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, semakin banyak jasa & barang yang akan mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak pula penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Kekurangan permintaan agregat ini adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran. Disamping itu faktor lain yang menimbulkan pengangguran antara lain :

- 1) Menganggur karena ingin mendapat pekerjaan yang lebih baik.
- 2) Pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja.
- 3) Ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

b. Akibat Buruk Pengangguran

Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Apabila keadaan pengangguran di suatu Negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan social selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

9. Masalah Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai dibawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai diantara 4 sampai 10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun.

Faktor-Faktor Penyebab Inflasi

Berikut adalah faktor-faktor penyebab inflasi menurut Sukirno (2017):

- a. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang & jasa.

Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.

Kedua masalah diatas biasanya berlaku apabila perekonomian sudah mendekati tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan kata lain dalam perekonomian yang sudah sangat maju, masalah inflasi sangat erat kaitanya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Selain itu inflasi dapat berlaku sebagai akibat dari :

- a. Kenaikan harga-harga barang impor.
- b. Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang.
- c. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.

10. Ketidakseimbangan Neraca Pembayaran

Istilah perekonomian terbuka berarti sesuatu perekonomian itu mempunyai hubungan ekonomi dengan Negara lain, dan terutama ini dilakukan dengan menjalankan kegiatan ekspor dan impor.

- a. Kebaikan dan Keburukan Perekonomian Terbuka

Sejak lama diyakini para ahli ekonomi klasik bahwa kegiatan perdagangan luar negeri memberikan manfaat kepada pertumbuhan ekonomi. Ekspor, misalnya akan mampu memperluas pasar barang buatan dalam negeri dan memungkinkan perusahaan dan industri dalam negeri untuk mengembangkan kegiatannya dan membuat karya bangsa diketahui oleh pasar luar negeri. Impor juga memberikan manfaat terhadap perekonomian ekonomi. Industri dapat mengimpor mesin atau bahan mentah yang tidak dimiliki di dalam negeri.

Namun tidak dipungkiri kegiatan perekonomian terbuka ini dapat merugikan negara. Misalnya saja, impor yang meningkat dan berlebihan akan mengganggu kegiatan ekonomi dalam negeri. Pengangguran akan meningkat dan modal dalam negeri

akan banyak mengalir ke luar negeri. Akan menyebabkan menurunnya nilai mata uang domestik.

b. Efek Dari Defisit Dalam Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari Negara-negara lain ke dalam negeri, dan dari dalam negeri ke Negara-negara lain dalam satu tahun tertentu. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi :

- 1) Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa.
- 2) Aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal keluar negeri.
- 3) Aliran ke luar dan aliran masuk modal jangka pendek (seperti mendepositkan uang di luar negeri).

Dua neraca penting dalam suatu neraca pembayaran adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan. Neraca perdagangan menunjukkan perimbangan di antara ekspor dan impor. Sedangkan neraca keseluruhan menunjukkan perimbangan di antara keseluruhan aliran pembayaran ke luar negeri dan keseluruhan aliran penerimaan dari luar negeri. Defisit neraca pembayaran berarti pembayaran keluar negeri melebihi penerimaan dari luar negeri. Salah satu factor penting yang menimbulkan masalah ini adalah impor melebihi ekspor.

Dengan demikian, sama halnya dengan masalah pengangguran dan inflasi, masalah defisit dalam neraca pembayaran dapat menimbulkan efek yang buruk ke atas prestasi kegiatan ekonomi dalam

jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu setiap Negara harus berusaha menghindari berlakunya defisit dalam neraca pembayaran.

11. Alat Pengamat Prestasi Kegiatan Ekonomi

Alat pengamat prestasi kegiatan perekonomian atau indikator makroekonomi (macroeconomic indicator) yang terutama adalah :

- a. Pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.
- b. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran.
- c. Tingkat perubahan harga-harga atau inflasi.
- d. Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
- e. Kestabilan nilai mata uang domestik.

12. PENDAPATAN NASIONAL

a. Mengukur Prestasi Kegiatan Ekonomi

Produk Nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi sesuatu Negara dalam satu tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik pengertian produk nasional di atas dibedakan kepada dua pengertian :

- 1) Produk Nasional Bruto (PNB) : Faktor-faktor produksi milik warga Negarasesuatu Negara.
- 2) Produk Domestik Bruto (PDB) : Faktor-faktor produksi di dalam negeri (milikwarga Negara dan orang asing) dalam sesuatu Negara.

Dari pengertian PNB dan PDB dapat disimpulkan bahwa kedua-dua konsep tersebut pada hakikatnya merupakan ukuran mengenai besarnya kemampuan sesuatu Negara untuk menghasilkan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.

b. Penggunaan Tenaga Kerja Dan Pengangguran

Pengangguran dalam suatu Negara adalah perbedaan di antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Yang dimaksudkan dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu.

Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan 2 informasi : yaitu : (A) jumlahpenduduk yang berusia di antara 15 tahun dan 64 tahun, dan (B) jumlah pendudukyang berusia di antara 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (contohnya : pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (A) dinamakan penduduk usia kerja, dan penduduk dalam golongan (B) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah pendudukdalam (A) dengan jumlah penduduk dalam (B). Perbandingan diantara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam %) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja.

c. Perubahan Indeks Harga Dan Tingkat Inflasi

Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang selalu digunakan adalah indeks harga konsumen, atau lebih dikenal

dengan istilah : Consumer Price Index (CPI) yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan para konsumen

1) Cara Membentuk Indeks Harga

Untuk membentuk indeks harga, tiga langkah perlu dilakukan : (A) memilih tahun dasar, yaitu tahun yang menjadi titik tolak dalam membandingkan perubahan harga, (B) menentukan jenis-jenis barang yang perubahan harga-harganya akan diamati untuk membentuk indeks harga, dan

(C) menghitung indeks harga.

2) Menentukan Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi terutama dimaksudkan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu tahun ke satu tahun lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari suatu tahun tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada tahun sebelumnya.

d. Kedudukan Neraca Perdagangan Dan Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran memberikan beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi di antara satu Negara dengan Negara-negara asing. Neraca pembayaran merupakan data yang member gambaran tentang lalu lintas perdagangan dan dana dari satu Negara ke berbagai Negara lain dalam satu tahun tertentu. Dua komponen penting dari neraca pembayaran yang perlu diperhatikan adalah neraca perdagangan dan neraca keseluruhan (overal balance).

Neraca Perdagangan dan Aliran Modal

Pertama neraca pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan perkembangan ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah kegiatan yang selalu dilakukan setiap Negara dan sampai dimana peranan kegiatan tersebut dalam perekonomian dapat diamati dari perkembangan neraca perdagangan. Defisit dalam neraca perdagangan, yang disebabkan oleh impor yang melebihi ekspor, mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di dalam negeri dan masalah pengangguran yang lebih serius akan dihadapi.

e. Kestabilan Kurs Valuta Asing

Salah satu alat pengukur lain yang selalu digunakan untuk menilai keteguhan sesuatu ekonomi adalah perbandingan nilai sesuatu mata uang asing (misalnya dolar US \$) dengan nilai mata uang domestik (misalnya rupiah Rp). Perbandingan itu dinamakan kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu.

Kurs valuta asing dapatlah dipandang sebagai "harga" dari sesuatu mata uang asing. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca keseluruhan. Neraca keseluruhan yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing. Dan sebaliknya apabila neraca pembayaran teguh (surplus dalam neraca keseluruhan) dan cadangan valuta asing yang dimiliki Negara terus-menerus bertambah jumlahnya, nilai valuta asing akan bertambah murah.

13. Kebijakan Makro Ekonomi

Tujuan-Tujuan Kebijakan Makroekonomi

- a. Menstabilkan kegiatan ekonomi.
- b. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi.
- c. Menghindari masalah inflasi.
- d. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.
- e. Mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing.

Berikut adalah penjelasan masing-masing tujuan kebijakan makroekonomi secara singkat:

- a. Menstabilkan kegiatan Ekonomi

Kestabilan ekonomi yang diidam-idamkan setiap Negara pada umumnya diartikan sebagai suatu keadaan ekonomi di mana tidak terdapat pengangguran yang serius dan perekonomian menikmati kestabilan harga-harga. Pengertian tersebut meliputi pula kestabilan dalam neraca pembayarannya. Dengan demikian pengertian kestabilan ekonomi meliputi kewujudan dari tiga hal berikut : 1)Tingkat penggunaan tenaga kerja adalah tinggi. 2)Tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. 3)Terdapat keseimbangan di antara ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari/ keluar negeri.

b. Penggunaan Tenaga Kerja Penuh Tanpa Inflasi

Keinginan semua perekonomian adalah menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Apabila suatu masyarakat dapat mencapai kestabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh tercapai maka akan mempermudah masyarakat mencapai hal tersebut. Berbagai negara akan terus mencoba untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, namun memang sulit. Kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat umumnya hanya mampu mengurangi pengangguran saja, tidak menghapusnya.

c. Menghindari Masalah Inflasi

Seperti yang kita ketahui, inflasi dapat menimbulkan efek buruk bagi perekonomian suatu negara. Adakalanya inflasi berlaku akibat adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi suatu negara. Tapi sering juga inflasi terjadi akibat permintaan masyarakat yang berlebihan, penambahan penawaran uang yang berlebihan dan kenaikan dalam biaya produksi.

d. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Teguh

Sedikit-dikitnya ada dua alasan yang menyebabkan sesuatu negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dalam jangka panjang : Untuk menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja yang terus menerus bertambah dan Untuk menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini merupakan pendorong utama kepada pemerintah untuk berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh.

Pertumbuhan ekonomi yang teguh merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang. Yang diinginkan oleh berbagai negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

e. Mengukuhkan Neraca Pembayaran dan Kurs Valuta Asing

Neraca pembayaran yang tidak kukuh akan mengurangi kemampuan suatu negara dalam menghadapi masalah pengaliran dana keluar negeri yang melebihi dari keadaan yang biasanya berlaku. Sebagai akibatnya cadangan mata uang asing akan merosot dan kurs mata uang asing meningkat. Hal ini akan menimbulkan beberapa efek buruk ke atas kegiatan ekonomi di dalam negeri seperti inflasi berlaku, biaya produksi meningkat akan tetapi sebaliknya daya beli riil masyarakat merosot.

14. Bentuk-Bentuk Kebijakan Makro Ekonomi“

Adapun terkait penyelesaian masalah yang ada, maka pemerintah memiliki langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan beberapa kebijakan, yakni:

- a. Kebijakan fiskal
- b. Kebijakan moneter
- c. Kebijakan segi penawaran

Penjelasannya dapat diperhatikan sebagai berikut.

a. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut Keynes kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relative serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral (di Indonesia Bank Sentral adalah Bank Indonesia) untuk mempengaruhi/mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

c. Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengandemikian kebijakan fiskal dan moneter tersebut dipandang sebagai *kebijakan darisegi permintaan*. Disamping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. *Kebijakan segi penawaran* bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (*incomes policy*), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan

kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan.

Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada (A) meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, dan (B) meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.

Disamping dengan meningkatkan kegairan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara : (A) mengembangkan infrastruktur, dan (B) peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta.

BAB 2

KONSEP PENDAPATAN NASIONAL DAN PENGHITUNGAN PDB

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Adapun pembelajaran bab 2 ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu membedakan konsep – konsep penting terkait Pendapatan nasional dan Penghitungan PDB.

B. URAIAN MATERI

1. Pengertian Pendapatan Nasional

Setiap kegiatan ekonomi dalam suatu negara pasti berkaitan dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional mampu menjawab analisis-analisis makro ekonomi, seperti bagaimana pertumbuhan ekonomi , berapa tingkat pertumbuhan ekonomi, sektor mana yang menyumbangkan pendapatan negara, dan lain-lain.

Maka informasi-informasi dalam pendapatan nasional lah yang akan mampu menjawab pertanyaan dari analisis tersebut. Setiap negara akan mengumpulkan informasi tersebut untuk melihat hasil penghitungan nilai barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian negara.

Menurut Latumaerissa (2015:17) “Pendapatan nasional adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar atau harga yang berlaku”.

2. Konsep-Konsep Penghitungan PDB

Hasil bersih dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen dalam suatu negara dari berbagai sektor ekonomi disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Agregat ini tidak sama dengan jumlah nilai produksi barang dan jasa secara keseluruhan , sebab dalam nilai produksi barang dan jasa ini ada kemungkinan terjadi penghitungan ganda, yaitu untuk barang-barang yang digunakan dalam proses produksi sebagai bahan baku dan penolong untuk memproduksi barang-barang di sektor lainnya. Turut masuk dalam

perhitungan. Oleh karena itu, Produk Domestik Bruto (PDB) didefinisikan sebagai jumlah Nilai Tambah Bruto dari semua sektor, dan diperoleh sebagai selisih antara Nilai Produksi atas dasar harga yang diterima oleh produsen, dikurangi nilai pemakaian bahan baku dan penolong atas dasar harga pembelian. Nilai Tambah Bruto mencakup penyusutan barang-barang modal, selisih pajak tak langsung dikurangi subsidi, upah/gaji, sewa dan bunga, serta laba. Pendapatan Nasional merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai hasil dari proses menghasilkan barang dan jasa yang meliputi: upah dan gaji, bunga, modal, sewa atas barang-barang modal termasuk sewa rumah serta laba perusahaan.

Kemudian Produk Domestik Bruto (PDB) ini digunakan untuk memenuhi permintaan rumah tangga, pembentukan modal (investasi), konsumsi pemerintah, dan permintaan ekspor di luar negeri. Semua hubungan tersebut di atas dapat dilukiskan sebagai berikut:

- a. Jumlah semua nilai produksi di dalam negeri atas dasar harga produsen dikurangi nilai pemakaian bahan baku dan penolong serta pengeluaran lainnya atas dasar harga pembelian, sama dengan Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar atau sama dengan Nilai Tambah Bruto dari semua sektor perekonomian. Ini semua sama dengan nilai balas jasa tenaga kerja (upah/gaji) ditambah sewa (peralatan, gedung, tanah) ditambah surplus usaha (laba) perusahaan, ditambah bunga modal, ditambah selisih pajak tak langsung dikurangi subsidi, merupakan nilai Produk Domestik Bruto pada harga faktor. Apabila PDB pada harga faktor dikurangi dengan penyusutan peralatan termasuk pabrik dan sebagainya didapatkan Produk Domestik Neto (PDN) dan ini disebut Pendapatan Nasional.
- b. Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar harus sama dengan "Penggunaan Produk" Domestik Bruto atas dasar harga pasar; dan agregat ini sama dengan jumlah konsumsi rumah tangga, ditambah pembentukan modal (investasi), (X-M) pengeluaran pemerintah, ekspor, dikurangi impor barang dan jasa.
- c. Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi sama dengan Produk Nasional Bruto (PNB) atas dasar harga pasar.
- d. Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar dikurangi pajak tak langsung dan subsidi sama dengan Produk Domestik Bruto atas dasar biaya faktor produksi.
- e. Produk Domestik Bruto atas dasar biaya faktor produksi dikurangi penyusutan barang-barang modal sama dengan Domestik Neto atas dasar biaya faktor produksi.

- f. Produk domestik Neto atas dasar biaya faktor produksi ditambah pendapatan netto terhadap luar negeri dari faktor produksi sama Produk Nasional Neto atas dasar biaya faktor produksi, dan sama dengan Pendapatan Nasional.

Karena semua nilai dihitung untuk waktu satu tahun, maka pendapatan nasional dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun.

Menurut Sukirno (2017: 34), "PDB (Produk Domestik Bruto) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu". Dalam bahasa Inggris PDB adalah GDP atau Gross Domestic Product, yakni "nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara atau WNA".

PNB (Produk Nasional Bruto) / Gross national Product (GNP) adalah konsep dimana nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung.

Jadi dalam PNB tidak dihitung produksi yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi milik penduduk atau perusahaan negara lain yang digunakan di negara tersebut. Hal ini dinyatakan dengan persamaan:

$$PDB = PNB - PFLN \text{ (Pendapatan Faktor dari LN)}$$

Istilah Pendapatan Nasional (National Income) dimaksudkan menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Pengertian lain adalah: Jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam satu tahun tertentu.

Pendapatan Nasional sendiri dapat dihasilkan dari nilai barang dan jasa dengan menggunakan harga berlaku, harga tetap, harga pasar dan harga faktor. Harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu tahun dan dinilai menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut. Harga tetap adalah harga yang berlaku pada satu tahun tertentu dan seterusnya untuk digunakan menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu. Harga pasar, berarti penghitungan nilai barang dan jasa itu menggunakan harga yang

dibayarkan oleh pembeli. Sedangkan harga faktor adalah harga yang dinilai tergantung pada jumlah pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang tersebut.

3. Manfaat Penghitungan Pendapatan Nasional

Menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai sesuatu negara dari tahun ke tahun merupakan salah satu kegunaan penting dari data pendapatan nasional. Dengan adanya pengamatan tingkat pertumbuhan yang dicapai maka suatu negara dapat dinilai prestasi ekonominya. Baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kesuksesan kegiatan ekonomi tersebut juga dapat dibandingkan dalam mengendalikan dan membangun perekonomian negara tersebut. Bahkan dapat juga sebagai pembandingan dengan negara-negara lainnya.

Menurut Latumaerissa (2015: 21) manfaat penghitungan pendapatan nasional adalah **pertama**: "data pendapatan nasional pada satu tahun tertentu memberi gambaran tentang: i) Tingkat kegiatan ekonomi negara yang dicapai dan nilai output yang diproduksi, ii) komposisi dari perbelanjaan agregat, iii) sumbangan berbagai sektor dalam mewujudkan pendapatan nasional, dan iv) taraf kemakmuran yang dicapai. Kedua, dapat membandingkan data pendapatan nasional dari tahun ke tahun akan memberikan gambaran tentang: tingkat pertumbuhan ekonomi, ii) perubahan struktur ekonomi, dan iii) peningkatan taraf kemakmuran masyarakat".

Maka secara rinci, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut ini menurut Latumaerissa (2015: 21):

a. Mengetahui dan Menelaah Kondisi atau Struktur Perekonomian

Dari perhitungan pendapatan nasional, kita dapat menggolongkan suatu negara sebagai negara industri, pertanian atau jasa. Dapat ditentukan pula besarnya sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Berdasarkan pendapatan nasional dapat kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara pertanian atau agraris, sedang Amerika Serikat, negara-negara di Eropa dan Jepang adalah negara industri. Di dalam perekonomian Indonesia kita mengenal ada 9 sektor ekonomi antara lain: i). Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan, ii). Pertambangan dan Penggalian, iii). Industri Pengolahan, iv). Listrik, Gas, dan Air Bersih, v). Konstruksi, vi). Perdagangan, Hotel dan Restoran, vii). Pengangkutan dan Komunikasi, viii). Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan, ix). Jasa-jasa

b. Membandingkan Kemajuan Perekonomian dari Waktu ke Waktu

Data mengenai pendapatan nasional dibuat setiap tahun, maka kita dapat membandingkan besarnya pendapatan nasional suatu negara dari tahun ke tahun. Perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi sebagai berikut, i). Ada tidaknya kenaikan atau penurunan perekonomian, ii). Ada tidaknya perubahan struktur ekonomi, iii). Pertambahan dan pengurangan kemakmuran materiil, iv). Kenaikan atau penurunan pendapatan per kapita berdasarkan jumlah penduduknya.

c. Membandingkan Perekonomian Antarbangsa atau Antardaerah

Data perhitungan pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk membandingkan perekonomian suatu negara dengan negara lain dan antar satu daerah dengan daerah lain. Kita dapat membandingkan pendapatan per kapita antara Amerika Serikat dengan Jepang dan antara Maluku dengan Jawa Timur. Perbandingan ini berguna untuk menilai seberapa jauh kita tertinggal atau lebih maju dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju atau lebih terbelakang dari kita.

d. Merumuskan Kebijakan Pemerintah

Perhitungan pendapatan nasional berguna pula untuk membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Seandainya kita menginginkan pertumbuhan produk nasional bruto setinggi 8%, maka perhitungan pendapatan nasional inilah yang kita lihat. Dengan mengetahui proporsi masing-masing sektor, pertanian 8% itu dialokasikan kepada sektor pertanian misalnya 5%, sektor industri 15%, pertambangan 12% dan seterusnya. Dari kecepatan pertumbuhan sektor pertanian dalam subsektor tanaman bahan makanan pemerintah dapat menentukan kebijakan pengadaan pangan. Misalnya dapat tidaknya bahan makanan disediakan dari produksi dalam negeri dan seberapa besar masih harus diimpor. Berdasarkan pendapatan per kapita, pemerintah dapat pula menentukan kebijakan kependudukan dan penggunaan dana investasi.

Pendapatan Perkapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Manfaat penghitungan pendapatan perkapita menurut Latumaerissa (2015: 23) adalah sebagai berikut:

- 1) Perbandingan data tingkat kesejahteraan antar negara

- 2) Perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lain
- 3) Data untuk mengambil kebijakan atau sebagai bahan utama pertimbangan dalam mengambil langkah ekonomi.
- 4) Data untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara

Berikut adalah beberapa penyebab pendapatan perkapita dimana sebagai barometer untuk mengukur taraf hidup rata-rata masyarakat masih memiliki kekurangan:

- 1) Tingginya pendapatan perkapita suatu negara dalam perhitungannya kurang memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan dan harga barang keperluan sehari-hari.
- 2) Tingginya pendapatan perkapita belum tentu mencerminkan secara realistis tingkat kesejahteraan masyarakat, karena ada faktor-faktor lain yang sifatnya relatif atau sangat subjektif sehingga sulit diukur tingkat kesejahterannya.
- 3) Tingginya pendapatan per kapita tidak menjelaskan mengenai masalah pengangguran yang ada serta berapa lama seseorang itu bekerja. Berdasarkan Bank Dunia (World Bank) tingkat pendapatan per kapita suatu negara dibedakan menjadi empat kelompok antara lain i). Negara berpendapatan rendah (Low Income Economics), ii). Negara yang berpendapatan menengah ke bawah (Lower Middle Economics), iii). Negara yang berpendapatan menengah tinggi (Upper Middle Economics) dan iv). Negara yang berpendapatan tinggi (High Income Economics)

4. Konsep PDB dan “Pendapatan Nasional

GNP (Gross National Product) atau PNB (Produk Nasional Bruto) didefinisikan sebagai nilai pasar untuk semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama satu tahun. PNB ini hanya merupakan ukuran produksi dan bukan penjualan, maka semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam tahun tersebut dihitung sebagai bagian dari PNB tanpa memperhatikan apakah barang itu dijual atau tidak.

Seandainya ada produksi yang dihasilkan lalu hanya disimpan di gudang, maka produk tersebut tetap dihitung sebagai PNB pada tahun yang bersangkutan. Karena, PNB hanya mengukur tentang produksi pada saat ini (tahun ini), maka banyak transaksi pasar (lewat jual beli) yang dikeluarkan dari perhitungan ini. Misalnya transaksi untuk barang-barang bekas, barang bekas tersebut tidak diperhitungkan dalam PNB tahun ini karena sudah dihitung

kontribusinya terhadap produk domestik bruto pada tahun yang lampau, dan tidak terjadi produksi apapun.

Jika dihasilkan sepeda motor tahun ini, maka sepeda motor tersebut akan dihitung dalam PNB tahun ini pula, dan seandainya dijual tahun depan maka dianggap sebagai “barang bekas” dan tidak diperhitungkan lagi di dalam PNB. Namun jika ada keuntungan atau komisi yang timbul karena adanya transaksi, maka harus diperhitungkan lagi di dalam PNB, karena di sini ada produksi jasa. Misalnya ada seseorang menjual sepeda motor bekas tetapi ada perbedaan harga, maka yang dihitung dalam PNB adalah keuntungannya. Kemudian jika ada seseorang yang menjualkan sepeda motor milik orang lain dan mendapat komisi, maka komisi tersebut harus dimasukkan pula di dalam PNB karena ada produksi jasa.

Demikian pula dengan keuntungan modal ataupun kerugian modal (capital gains and capital losses). Kerugian atau keuntungan yang timbul karena adanya kenaikan atau penurunan harga, tidak diperhitungkan atau dimasukkan dalam PNB, karena hal itu tidak disebabkan oleh adanya produksi saat ini. Contoh dari capital gains ini misalnya, jika kita membangun gedung tahun ini dan tahun depan nilainya naik karena adanya inflasi. Kenaikan nilai ini bukan merupakan produksi tetapi merupakan capital gain sehingga tidak dimasukkan ke dalam PNB.

Hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak legal (tidak sah), produksinya juga tidak diperhitungkan dalam PNB, sebagai contoh misalnya penyelundupan. Karena tersedianya barang-barang tersebut tidak legal, maka sulit sekali diperkirakan baik jumlah produksinya maupun harganya. Sebetulnya bisa saja diperkirakan walaupun tidak cermat, tetapi secara internasional sudah disetujui bahwa hal-hal atau kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimasukkan ke dalam PNB.

Pada dasarnya PNB itu menghitung semua barang dan jasa yang dapat dipasarkan atau dapat diperjualbelikan melalui pasar. Namun ada pengecualian yaitu barang-barang yang transaksinya tidak dapat kita lihat melalui pasar. Misalnya: sewa rumah. Yang dihitung di dalam PNB tidak hanya rumah-rumah yang disewakan sajamelainkan yang ditempati oleh pemiliknya juga harus dihitung. Cara ini disebut dengan “imputed method” dan sewa rumah yang demikian itu disebut dengan “imputed rents”.

Produk Nasional Bruto harus dibedakan dari Produk Domestik Bruto. Kata “Nasional” berarti “Bangsa Indonesia”, sehingga kita sudah mengurangkan atau menghilangkan pendapatan orang-orang asing yang ada di negara kita, dan memasukkan pendapatan bangsa Indonesia yang ada di luar negeri. Sedangkan “domestik”

berarti segala kegiatan atau produksi yang ada di dalam negara semuanya kita hitung, tidak peduli apakah itu milik atau produk orang asing atau bukan. Sebagai contoh adalah penanaman modal milik orang asing di Indonesia, seperti : Mc Donald, Hoka-Hoka Bento, Hitachi, Daihatsu. Jika keuntungan modal tersebut kita hitung sebagai pendapatan di Indonesia maka akan kita peroleh PDB. Tetapi jika keuntungan dan dividennya tidak dihitung atau dikeluarkan sedangkan keuntungan pengusaha Indonesia di luar negeri dimasukkan dalam perhitungan maka akan kita peroleh PNB.

Hal lain yang perlu dibedakan lagi adalah pengertian bruto dan neto. Yang membedakan antara keduanya adalah penyusutan barang modal (depresiasi). Penyusutan harus diperhitungkan di dalam PNB karena merupakan biaya. Jika penyusutan ini dikurangkan dari PNB, maka akan kita peroleh Produk Nasional Neto (PNN) atau pendapatan nasional.

Contoh kegiatan lain atau produksi yang tidak dimasukkan di dalam perhitungan PNB adalah kegiatan ibu rumah tangga. Seorang ibu yang bekerja di rumah, memasak misalnya, itu berarti menghasilkan jasa dan tentu saja ada nilai tambahnya. Namun karena jasa tersebut tidak dipasarkan maka disepakati untuk tidak dihitung di dalam PNB.

PNB dikurangi dengan penyusutan akan menghasilkan Produk Nasional Neto (PNN). Selanjutnya PNN dikurangi dengan pembayaran transfer oleh perusahaan dan ditambah dengan subsidi akan menghasilkan Pendapatan Nasional (PN). Pendapatan Nasional ini sesungguhnya merupakan penjumlahan dari upah, gaji, sewa dan bunga, serta laba.

Tujuan kita mempelajari PNB, PNN, dan PN tidak lain adalah untuk mengetahui perkembangan atau pertumbuhan perekonomian Suatu negara. Jadi jika kita ingin mengetahui apakah suatu perekonomian itu berkembang atau tidak, kita dapat melihat salah satu dari ketiga hal di atas yaitu PNB, PNN, maupun PN. Namun yang umum dipakai sebagai indikator pertumbuhan suatu perekonomian adalah PNB.

5. Penggunaan Produk Domestik Bruto

Tabel 3 menunjukkan pendekatan pengeluaran dalam penghitungan pendapatan nasional. Kita dapat mengetahui untuk apa saja PDB itu digunakan. Konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi atau pembentukan modal tetap, dan ekspor/import neto, semuanya merupakan permintaan terhadap barang dan jasa, dan oleh karena itu juga berarti sebagai macam penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Dengan kata lain PDB itu digunakan untuk keperluan

konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah , konsumsi sektor usaha (investasi), dan konsumsi negara lain berupa ekspor neto.

Penggunaan PDB ini dapat dilihat contohnya dalam angka-angka pada Tabel 3 di mana tampak bahwa PDB 2014 pada harga konstan tahun 2000 ada sebesar Rp 10.094.928,90 miliar. Apabila angka tersebut ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri dari faktor produksi sebanyak (Rp 343.218,93 miliar rupiah), kita mendapatkan nilai Produk Nasional Bruto (PNB) sebesar Rp 9.751.709,97 miliar. Kemudian dengan dikurangkannya pajak tak langsung sebesar Rp 275.872,69 miliardan penyusutan barang kapital sebesar Rp 504.746,45 miliar, kita memperoleh angka pendapatan nasional (PN) sebesar Rp 8.971. 090,84 miliar. Jadi tampak jelas sekarang bahwa permintaan agregat $\{(C + I + G + (X-M))\}$ sama dengan nilai Y sebagai produk domestik bruto (PDB). Distribusi PDB tahun 2014 menurut harga konstan dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3

Distribusi Produk Domestik Bruto 2014 Menurut Harga Konstan

No	Jenis Pengeluaran	2014	
		Rp miliar	%
1	Pengeluaran Konsumsi RumahTangga	5.665.226,31	56,12
2	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	906.926,34	8,98
3	PembentukanModal Tetap Domestik Bruto	3.199.693,29	31,70
4	Perubahan Inventori (perubahanstock)	251.652,99	2,49
5	Ekspor Barang dan Jasa	2.330.145,41	23,08
6	Impor Barang dan Jasa	2.507.362,53	24,84
7	Produk domestik bruto	10.094.928,90	100,00
8	Pendapatan Neto terhadap LuarNegeri	- 343.218,93	- 3,40
9	Produk nasional bruto	9.751.709,97	96,60
10	Dikurangi pajak tidak langsung	275.872,69	2,73
11	Dikurangi penyusutan	504.746,45	5,00
12	Pendapatan nasional	8.971.090,84	88,87

Sumber:BPS dalam Suparmoko dan Sofilda (2016).

Perubahan pendapatan nasional (Y) dapat ditentukan oleh perubahan permintaan agregat, maka perlu mengetahui masing-masing komponen permintaan agregat tersebut.

6. Konsumsi Rumah Tangga (C) dan Tabungan (S)

Pengeluaran konsumsi dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: konsumsi untuk barang-barang yang awet, barang yang tidak awet, dan jasa. Pada dasarnya PDB itu menghitung nilai produksi semua barang dan jasa yang dapat dipasarkan atau dapat dijual untuk konsumsi. Barang yang habis dipakai dalam waktu lebih dari satu tahun disebut barang awet. Barang yang tidak awet adalah barang yang umur penggunaannya kurang dari satu tahun, seperti: bahan makanan dan pakaian. Sedangkan contoh konsumsi jasa yaitu: salon kecantikan, berobat ke dokter, reparasi sepatu, dan sebagainya. Seperti telah disebutkan di atas konsumsi rumah tangga di Indonesia pada tahun 2014 menduduki proporsi terbesar (35,12%) dibanding dengan konsumsi pelaku ekonomi lainnya. Peranan sektor konsumsi ini relatif menyempit dibanding dengan tahun sebelumnya (1985) yang mencapai 61,61 persen. (Suparmoko & Sofilda, 2016:30).

Naik turunnya konsumsi rumah tangga mempengaruhi penjualan perusahaan dan produksi. Umumnya rumah tangga dapat membelanjakan atau menabung dari pendapatannya, selanjutnya tiap presentase pendapatan yang digunakan untuk konsumsi barang dan jasa meningkat maka akan mengurangi porsi pendapatan untuk konsumsi, dan akan meningkatkan persentase pendapatan yang ditabung.

Karya & Syamsuddin (2016: 67) menyatakan bahwa pendapatan sektor rumah tangga diperoleh dari balas jasa yang disumbangkan ke sektor perusahaan yaitu berupa gaji, sewa, bunga dan deviden. Sedangkan pendapatan sektor rumah tangga digunakan untuk pengeluaran konsumsi dan sisanya untuk tabungan rumah tangga. Karya & Syamsuddin juga menambahkan maka secara umum faktor penentu konsumsi dan tabungan rumah tangga adalah:

- a. Tingkat pendapatan disposabel rumah tangga, karena disposable income sebagai cerminan daya beli rumah tangga.
- b. Suku bunga: Kecenderungan menabung akan tinggi bila suku bunga dianggap tinggi bagi rumah tangga atau lebih menjanjikan memperoleh pendapatan lebih besar di masa datang. Sebaliknya dengan suku bunga rendah rumah tangga enggan menabungkan danaya atau merasa lebih baik mengkonsumsi.
- c. Sikap Berhemat: sikap hemat berkaitan dengan konsep APC, MPC, APS, dan MPS
- d. Distribusi Pendapatan: masyarakat yang distribusi pendapatan yang lebih merata tingkat tabungannya relatif sedikit karena kecenderungan mengkonsumsi.

e. Kondisi perekonomian: dalam perekonomian yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara tangguh dan pengangguran sedikit kecenderungan pengeluaran konsumsi relatif aktif dan kurang menabung. Masyarakat akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran konsumsi.

a. Investasi (I)

Biasanya yang dimaksud dengan Investasi adalah investasi bruto oleh perusahaan, yaitu jumlah nilai pasar dari bangunan dan peralatan yang tahan lama serta perubahan di dalam nilai persediaan perusahaan (inventory), Jadi investasi bruto meliputi: pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin baru dan pembangunan rumah baru serta tamba han persediaan perusahaan. Pembelian rumah oleh pribadi seseorang, tidak dimasukkan sebagai investasi melainkan konsumsi, sedangkan pembelian rumah oleh perusahaan untuk karyawan-karyawannya, dapat dikatakan sebagai investasi.

Jadi yang mengadakan investasi hanyalah perusahaan (business firm), karena investasi adalah menanam modal untuk menghasilkan kembali. Di setiap perusahaan setiap kali tentu ada barang-barang yang aus sehingga harus diperhitungkan penyusutannya. Investasi kotor (bruto) dikurangi dengan penyusutan adalah investasi bersih (neto).

Pada Tabel 2.3 yang dimaksud dengan pembentukan modal tetap domestikbruto adalah investasi yang dikehendaki (intended investment), sedangkan perubahan stock adalah investasi yang tidak dikehendaki (unintended investment) dan ini dapat juga disebut persediaan (inventory).

Investasi atau pembentukan modal tetap pada tahun 2014 mencapai 31,7 persen dari total PDB Indonesia pada tahun tersebut. Jika perubahan cadangan atau inventori dihitung sebagai bagian dari investasi yang tidak dikehendaki dan merupakan perubahan stock, maka nilai total investasi mencapai 34,19 persen. Jika peranan sektor usaha swasta ini dibandingkn dengan keadaan tahun 1985, maka tampak bahwa sektor swasta menjadi semakin penting peranannya dalam perekonomian Indonesia. Jadi boleh dikatakan bahwa perekonomian Indonesia lebih dikuasai oleh sektor swasta pada masa setelah periode reformasi sekarang ini dibanding dengan periode sebelumnya.

b. Pengeluaran Pemerintah (G)

Pemerintah membeli barang dan jasa untuk memperlancar kegiatannya. Apabila seorang Bupati Kepala Daerah selaku pemerintah membeli mesin, maka pembelian ini termasuk pengeluaran pemerintah. Selain untuk pembelian barang dan jasa, ada juga pengeluaran yang bersifat transfer. Sebagai contoh, apabila pemerintah menyumbang sepuluh ton beras untuk membantu rakyat yang kelaparan, ini bukan disebut pengeluaran pemerintah (G) tetapi pengeluaran transfer (Tr).

Dalam hal ini pemerintah memang mengeluarkan uang untuk membeli beras tetapi karena tujuannya akan diberikan kepada pihak lain dan tidak untuk pemerintah sendiri maka disebut pengeluaran transfer atau subsidi, sebab dampaknya terhadap pendapatan nasional akan berbeda. Dari Tabel 3 dapat diketahui juga besarnya nilai konsumsi atau pengeluaran Pemerintah sebesar Rp906.926,34 atau sekitar 8,98 persen dari nilai total PDB Indonesia pada harga konstan tahun 2000. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 1986, pengeluaran konsumsi Pemerintah mencapai 11,59 persen dari PDB pada tahun tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa peranan Pemerintah saat ini (2014) relatif menjadi lebih kecil dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya (1985).

c. Ekspor dan Impor (X-M)

Ekspor (X) dan impor (M) biasanya ditulis menjadi satu dalam tanda kurung yaitu (X- M). Ini disebut dengan ekspor/impor neto. Yang tercakup di dalam ekspor/impor neto tersebut tidak hanya ekspor /impor barang, melainkan mencakup pula ekspor/impor jasa. Contohnya dari ekspor jasa misalnya: pesawat Garuda yang terbang ke Los Angeles dan dinaiki oleh orang asing. Ini berarti kita mengekspor jasa. Tetapi apabila yang naik itu orang Indonesia sendiri, berarti tidak ada ekspor jasa. Jadi ekspor neto adalah nilai dari ekspor barang dan jasa dikurangi dengan nilai dari impor barang dan jasa. Mengapa impor muncul dalam perhitungan pendapatan nasional? Karena bila kita mengimpor berarti mendatangkan barang atau jasa dari luar negeri. Padahal yang kita hitung dalam pendapatan nasional adalah produksi yang ada di dalam negeri dan dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Tetapi karena kita juga mengkonsumsi produk yang dihasilkan bangsa lain melalui impor, maka supaya penghitungan ini sungguh- sungguh mencerminkan keadaan di negara kita, maka ekspor dan impor harus diperhitungkan sebagai ekspor neto.

Dari Tabel 3 terlihat bahwa impor dan ekspor yang menunjukkan keadaan neraca perdagangan yang negatif karena nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor.

7. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional merupakan hasil penghitungan dari PDB dikurangi dengan pendapatan neto terhadap luar negeri, sehingga nilai produk nasional bruto (PNB) pada tahun 2014 menjadi lebih kecil dibanding produk domestik bruto (PDB) yaitu $\text{Rp } 10.094.928,90 - \text{Rp } 343.218,93 = \text{Rp } 9.751.709,97$.

Untuk menjadi pendapatan nasional (PN), nilai PNB harus dikurangi dengan nilai pajak tidak langsung dan nilai penyusutan, yaitu $\text{Rp } 9.751.709,97 - (\text{Rp } 275.872,69 + 504.746,45) = \text{Rp } 8.971.090,84$. Inilah nilai pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2014.

a. PNB Nominal dan PNB Riil

Dalam penghitungan produksi nasional ataupun pendapatan nasional, kita menggunakan harga pasar atau nilai nominal karena kita harus menjumlahkan nilai produksi dan bukan menjumlahkan barang yang dihasilkan oleh masyarakat. Meja, kursi, dan berastidak dapat dijumlahkan. Oleh karena itu semua barang dan jasa harus dinilai dengan harga pasarsehingga nilainya memungkinkan untuk dijumlahkan. Namun penggunaan harga pasar ini kadang-kadang menimbulkan masalah apabila kita harus membandingkan PNB pada tahun tertentu dengan tahun yang lain.

Contoh: Produksi Padi tahun 2014-2015, pada biaya berlaku dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4 "Contoh Produksi Padi, Pada Biaya Yang Berlaku 2014-2015

	Tahun 2014	Tahun 2015
Produk Padi	100 ton	200 ton
Harga yang berlaku Nilai Produk (PNB)	Rp 50.000;/ton Rp 5.000.000,	Rp 75.000;/ton Rp. 15.000.000;

Sumber: Suparmoko dan Sofilda (2016).

Nilai produksi padi merupakan hasil perkalian antara jumlah produksi padi dengan harganya. Apabila dianggap pendapatan atau produksi di suatu negara hanya terdiri dari padi saja maka Produk Nasional Bruto untuk tahun 2014 sebesar Rp 5 juta dan untuk tahun 2015 sebesar Rp 15 juta. Di sini diasumsikan tidak ada biaya produksi atau pendapatan sudah merupakan pendapatan bersih, sehingga seolah-olah produksi mengalami kenaikan Rp 10.000.000; atau sebesar 200%. Namun, apabila dilihat peningkatan produksi padi yang sesungguhnya, yaitu dari 100 ton menjadi 200 ton, hanya mengalami kenaikan sebesar 100%. Jadi, dapat dikatakan bahwa secara nominal PNB mengalami kenaikan sebesar 200% tetapi secara riil hanya bertambah sebesar 100%. Angka kenaikan secara riil tersebut sebetulnya dapat dicari tanpa melihat jumlah produksi. Caranya ialah dengan menggunakan nilai atau harga konstan. Dari contoh di atas, PNB tahun 2015 dinilai dengan harga tahun 2014 atau pada harga konstan tahun 2014 dihitung sebagai berikut:

$$\text{PNB pada harga konstan 2014} = \frac{\text{Harga Tahun 2014}}{\text{Harga Tahun 2015}} \times \text{PNB}_{2015}, \text{ atau}$$

$$\frac{50.000}{10.000.000;} \times \text{Rp } 15.000.000; = \text{Rp } 75.000$$

Jadi, secara riil Produk Nasional Bruto meningkat dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta atau mengalami kenaikan sebesar 100%. PNB tahun 2015 sebesar Rp 15 juta disebut PNB pada harga yang berlaku sedangkan PNB tahun 2014 sebesar Rp 10 juta disebut PNB pada harga konstan tahun 2014 atau PNB riil. Penentuan harga konstan tersebut bisa diambil untuk tahun-tahun yang lain, tidak harus tahun 2014.

Untuk melihat perkembangan dan pertumbuhan suatu perekonomian, maka yang lebih tepat digunakan adalah PNB riil, sebab dalam PNB riil ini harga-harga dianggap konstan. Dengan dihilangkannya pengaruh perubahan harga, maka yang akan tampak adalah perubahan produksinya secara fisik. PNB Riil pada dasarnya sama dengan PNB nominal dibagi dengan implicit price deflator (Ip), atau

$$\text{PNB RILL} = \frac{\text{PNB Nominal}}{I_p}$$

$$I_p = \frac{I_c}{I_d}$$

Atau,

$$\text{PNB Riil} = \frac{\text{PNB Nominal}}{I_c} \times I_d$$

Dimana:

PNB = Produk Nasional

Brutolp = Implicit price

Deflator

I_c = Harga indeks tahun bersangkutan

I_d = Harga Indeks untuk tahun yang diinginkan sebagai dasar

Implicit price deflator ini (I_p) adalah rasio antara indeks harga pada tahun yang bersangkutan (I_c) adalah indeks harga yang nilainya akan digunakan sebagai harga patokan atau sebagai harga konstan (I_d). Dengan menggunakan rumus di atas, maka contoh perhitungannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{PNB}_{\text{riil}2015} = \text{PNB}_{\text{harga konstan}2014} = \frac{\text{PNB}_{2015}}{\text{harga}_{2015}} \times \text{Harga}_{2014}$$

Produk domestik bruto biasanya dipakai untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu bangsa. Demikian pula produk nasional bruto atau pendapatannasional juga dapat dipakai sebagai alat pengukur kesejahteraan suatu bangsa. Namun, ini bukan merupakan suatu hal yang paling sempurna, sebab sesungguhnya banyak sekali kegiatan yang sifatnya tidak legal/tidak sah dan juga ada kegiatan- kegiatan yang tidak dilaporkan, seperti masalah pajak. Sehingga angka-angka yang dihasilkan merupakan suatu perkiraan kasar. Hal-hal seperti ini tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional, sehingga hal yang tidak legal dan yang tidak dilaporkan terpaksa tidak muncul dalam perhitungan pendapatan nasional. Oleh karena itu, sesungguhnya perkiraan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) seringkali terlalu rendah (under estimate).

Hal-hal yang tidak legal di antaranya adalah penyeludupan barang-barang dariluar negeri ke dalam negeri, kegiatan perjudian dan pelacuran. Untuk menghindari perhitungan yang terlalu rendah (underestimate) tersebut pemerintah berusaha untuk memperkecil kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas. Sehingga boleh dikatakan bahwa PNB merupakan pengukuran yang belum sempurna. Di samping itu kita harus mempertimbangkan mengenai pertumbuhan jumlah penduduk, karena kenaikan jumlah penduduk pasti akan menyerap kenaikan PNB, sebab mereka harus mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan dalam perekonomian sehingga jika kenaikan jumlah penduduk ini sama dengan kenaikan PNB berarti kesejahteraan tidak meningkat.

Akhir-akhir ini, terutama sejak tahun 1987 Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (World Commision on Environment and Development) telah mengemukakan laporan yang bertema pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Makna pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya konsep pembangunan yang berkelanjutan mulai dirasa penting untuk menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan (natural resource and environmental accounting) dan sekaligus menyusun PDB Hijau.

Pada prinsipnya dalam penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan akan diketahui perubahan cadangan sumber daya alam (nilai deplesi dan nilai degradasi lingkungan) maupun volume fisiknya. Kemudian perubahan nilai cadangan ini harus dimasukkan dalam sistem penghitungan pendapatan nasional yang tradisional dan akan diperoleh nilai PDB yang disesuaikan yaitu PDB Hijau atau

pendapatan nasional yang memasukkan unsur deplesi sumber daya alam dan degradasi lingkungan. Jadi PDB Hijau = PDB Konvensional nilai deplesi sumber daya alam nilai degradasi lingkungan.

BAB 3

KESEIMBANGAN PEREKONOMIAN TERTUTUP

A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menghitung keseimbangan ekonomi tiga sektor atau perekonomian tertutup.

B. Uraian Materi

1. Keseimbangan Perekonomian Tertutup

- a. Penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu :
- b. Pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan keatas konsumsi rumah tangga.
- c. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat.

Perubahan-perubahan ini penting pengaruhnya kepada penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Dalam perekonomian tiga sektor kegiatan perdagangan luar negeri masih diabaikan. Dalam menganalisis perekonomian tiga sektor masih tetap dimisalkan kegiatan ekspor dan impor tidak dilakukan. Ini berarti analisis yang dibuat masih memisalkan bahwa barang & jasa yang diproduksi tidak dijual keluar negeri dan masyarakat / perusahaan tidak membeli dan menggunakan barang & jasa yang diimpor. Disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup.

Karya & Syamsuddin (2016: 116) menyatakan bahwa terdapat tiga sektor ekonomi yang aktif dalam aktivitas ekonomi:

- a. Sektor rumah tangga (*Personal Sectors*)
- b. Sektor swasta/ perusahaan (*Business sectors*)
- c. Sektor Pemerintah (*Government sectors*)

Melalui pendekatan pengeluaran, maka pendapatan nasional dapat ditulis persamaannya:

$$\text{GNP} = C + I + G \text{ atau } Y = C + I + G$$

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian mampu mempengaruhi keseimbangan perekonomian. Pemerintah dalam usaha memperoleh pendapatannya terutama melalui kebijakan pemungutan pajak baik terhadap rumah tangga atau perusahaan. Pajak yang dipungut dapat secara bertahap atau pun proporsional. Dampak pemungutan pajak adalah:

- a. Pajak yang dipungut pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga.
- b. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang kemudian juga digunakan untuk pembelanjaan, yang selanjutnya akan menaikkan penerimaan agregat.

2. Aliran Pendapatan dan Syarat Keseimbangan

Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor bertujuan untuk menunjukkan penentuan pendapatan nasional dalam perekonomian dimana terdapat pemerintah.

a. Aliran Pendapatan Dan Pengeluaran

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah :

- 1) Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang utama.
- 2) Aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah keatas barang & jasa yang diproduksi oleh sektor perusahaan.
- 3) Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran keatas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah.

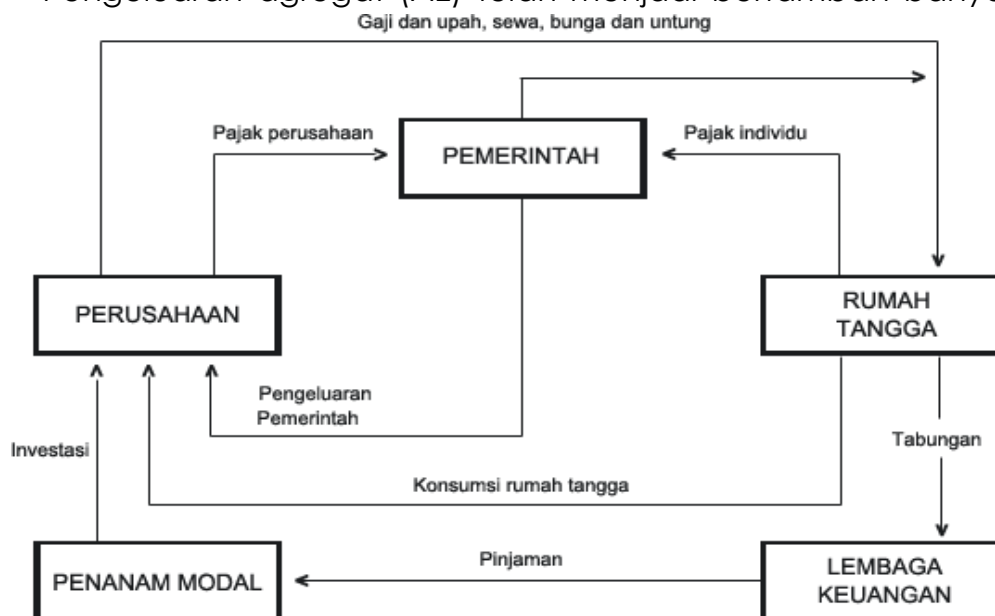
Dalam suatu perekonomian tertutup ciri-ciri pokok aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah.
- 2) Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber. Dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang & jasa.

Pendapatan yang diterima rumah tangga (Y) akan digunakan untuk memenuhi 3 kebutuhan : membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi (C), disimpan sebagai tabungan (S) dan membayar pajak pendapatan rumah tangga (T). dalam persamaan : $Y = C + S + T$.

Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal.

Pengeluaran agregat (AE) telah menjadi bertambah banyak



Gambar 5.1
Sirkulasi Aliran Pendapatan perekonomian Tiga Sektor

jenisnya, yaitu disamping pengeluaran konsumsi (C) dan investasi (I) sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah (G). dalam persamaan $AE = C + I + G$.

b. Syarat Keseimbangan

Total pengeluaran atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh berbagai pihak dalam ekonomi terdiri dari tiga jenis pengeluaran: konsumsi rumah tangga (C), investasi bisnis (I) dan pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa (G). Dengan demikian, kondisi yang menciptakan keseimbangan dalam ekonomi tiga sektor adalah penawaran agregat = pengeluaran agregat ($Y = AE$) atau:

$$Y = C + I + G$$

Aktivitas perusahaan dalam pembuatan barang dan jasa menghasilkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga (upah dan gaji, sewa, bunga, dan keuntungan) sama dengan pendapatan nasional (Y). Gambar 5.1 menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga digunakan untuk tiga tujuan: konsumsi (C), tabungan (S) dan pajak (T). Berdasarkan aliran pendapatan yang memanifestasikan diri dalam tiga sektor ekonomi, kesamaan berikut :

$$Y = C + S + T$$

Uraian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dalam keseimbangan berlaku kesamaan berikut : $Y = C + I + G$. sedangkan pada setiap tingkat pendapatannasional berlaku kesamaan $Y = C + S + T$. dengan demikian pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut :

$$C + I + G = C + S + T$$

Apabila C dikurangi dari setiap ruas maka :

$$I + G = S + T$$

Sebagai kesimpulan dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan berikut :

$$Y = C + I + G, \text{ dan}$$

$$I + G = S + T$$

3. Jenis-jenis Pajak

Dalam setiap kegiatan perekonomian, pemerintah melakukan berbagai jenis perbeanjaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam administrasi pemerintah, pembangunan, perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Karenanya pemerintah memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana tersebut diperoleh dari pungutan pajak dari masyarakat dan rumah tangga.

Berikut ini struktur pajak yang dijadikan sumber dana pembiayaan pengeluaran pemerintah.

Pajak Langsung Dan Tak Langsung

Yang dimaksud pajak langsung yaitu pungutan pemerintah yang langsung diperoleh dari wajib pajak yang membayar pajak yaitu penerimaan pajak yang diperoleh dari wajib pajak individu dan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dan memperoleh keuntungan. Sedangkan yang dimaksud pajak tak langsung yaitu pajak dimana beban pajaknya dapat dipindahkan kepada pihak lain, seperti pajak impor. Perusahaan yang mengimport barang, maka beban pajak importnya merupakan beban bagi perusahaan. Akan tetapi, pada saat penjualan barang tersebut biaya pajak akan dibebankan kepada para konsumen melalui penentuan harga jual barang.

4. Bentuk-Bentuk Pajak Pendapatan

Pajak Regresif adalah sistem pajak yang persentasi pungutan pajaknya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Contohnya adalah pajak impor dan pajak penjualan.

Pajak Proporsional adalah persentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan.

Pajak Progresif adalah sistem pajak yang persentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat.

Pajak progresif menyebabkan pertambahan nominal pajak yang dibayar akan menjadi semakin cepat apabila pendapatan semakin tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh

pendapatan pajak yang lebih banyak. Disamping itu sistem ini bertujuan untuk lebih meratakan pendapatan.

5. Efek Pajak Ke Atas Konsumsi dan Tabungan

Pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga baik berasal dari upah/gaji, sewa, bunga dan masih berupa pendapatan kotor. Pendapatan ini akan berkurang setelah dikenakan pajak (T_x). Yang dimaksudkan dengan pendapatan dalam pernyataan ini adalah pendapatan “*earned income*” yaitu jumlah pendapatannya yang diterima oleh rumah tangga dalam jangka waktu tertentu sebagai imbalan balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan untuk terlibat membentuk produksi nasional.

Dalam perekonomian tertutup yang menggunakan kebijaksanaan perpajakan dengan sistem pajak sederhana, yaitu sistem yang membolehkan penetapan pajak tidak ditentukan oleh salah satu atau beberapa variabel yang dianalisis.

Dengan diberlakukannya kebijaksanaan fiskal, sudah tentu pendapatan masyarakat (rumah tangga) akan berkurang. Dengan kata lain untuk kebutuhan konsumsi dan tabungan rumah tangga tidak lagi ditentukan secara langsung oleh tinggi rendahnya pendapatan nasional sebagai pendapatan, akan tetapi ditentukan oleh besarnya pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan. Pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan adalah hasil pengurangan pendapatan nasional dari rumah tangga dengan pajak atau disebut dengan *disposable income* (Y_d).

Hubungan antara pendapatan disposable (Y_d) dan pendapatan nasional (Y) dalam perekonomian, dinyatakan dengan persamaan berikut ini:

$$Y_d = Y - T$$

Dimana:

Y_d = Pendapatan Disposable

Y = Pendapatan Nasional

T = Pajak

Dari rumus di atas, maka pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebesar pajak yang dipungut. Dengan penurunan pendapatan disposable akan mengurangi pengeluaran

konsumsi dan tabungan rumah tangga pada berbagai tingkat pendapatan.

a. Contoh Angka : Pajak Tetap

Dalam tabel ditunjukkan satu contoh yang menunjukkan akibat dari pungutan pajak ke atau konsumsi dan tabungan rumah tangga dengan contoh angka. Pemisalan yang digunakan adalah fungsi konsumsi dan tabungan rumah tangga sebagai berikut:

$$C = 90 + 0.75Y \text{ atau } C = 90 + 0,75 Y_d$$

$$S = -90 + 0,25 Y \text{ atau } S = -90 + 0,25 Y_d$$

Dalam persamaan tersebut di atas C sebagai fungsi Y adalah sama dengan C sebagai fungsi Y_d begitu pula S sebagai fungsi Y adalah sama dengan S sebagai fungsi Y_d . Kesamaan tersebut disebabkan karena pemerintah tidak memungut pajak, jadi Y adalah sama dengan Y_d .

Keadaan sebelum pajak berdasarkan pemisalan maka ditunjukkan dengan keadaan sebagai berikut:

Pada ketika pendapatan nasional adalah nol ($Y = 0$) konsumsi rumah tangga adalah sebanyak “ Rp. 90 T.

Dimisalkan pendapatan nasional selalu mengalami kenaikan sebanyak Rp.

240 T, yaitu dari 0 menjadi Rp. 240 T, kemudian menjadi Rp. 480 T dan seterusnya. Maka kenaikan Y atau $Y_d = 240$.

Kenaikan pendapatan akan mengakibatkan kenaikan konsumsi dan tabungan. Hubungan dinyatakan dengan formula:

$$\Delta C = MPC \times \Delta Y_d \text{ dan}$$

$$\Delta S = MPS \times \Delta Y_d$$

b. Contoh Angka: Pajak Proporsional

Pemisalan dalam data tabel ini akan menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut: (Angka dalam Triliun Rupiah)

Fungsi konsumsi adalah $C = 90 + 0,75 Y_d$ berdasarkan pemisalan ini apa bila $Y_d = 0$ maka $C = 90$ dan perubahan konsumsi dan tabungan pada berbagai tingkat pendapatan nasional adalah $\Delta C = 0,75 \times T$ dan $\Delta S = 0,25 \times T$.

Pajak proporsional yang dipungut pemerintah adalah sebanyak 20 % dari pendapatan nasional ($T = 0,2 Y$).

Dari setiap tingkat pendapatan nasional ke tingkat pendapatan nasional lainnya pertambahannya adalah sebanyak“ Rp. 240 T. maka akan menyebabkan kenaikan pada pendapatan diseperti sebanyak Rp. 240 T juga. disebabkan $T = 0,2Y$ maka pertambahan pendapatan diseperti bertambah sebanyak Rp.192 T.

6. Pengeluaran Pemerintah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan negara. Bagian dari pengeluaran negara digunakan untuk membiayai administrasi negara dan bagian lain untuk membiayai kegiatan pembangunan. Membayar gaji kepada pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai pengeluaran militer, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur kritis.

a. Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

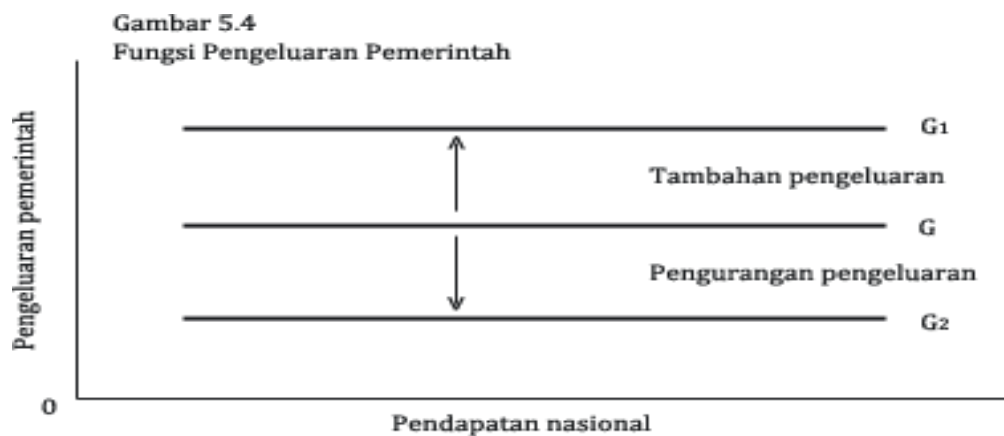
Jumlah belanja publik selama periode waktu tertentu tergantung pada banyak faktor. Faktor yang menentukan adalah tarif pajak, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang serta pertimbangan politik dan keamanan.

Taksiran jumlah pajak untuk penyusunan anggaran negara harus terlebih dahulu mencakup taksiran jumlah pajak yang harus dibayar. Semakin banyak pajak dikumpulkan, semakin banyak pengeluaran pemerintah akan dilakukan.

Tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh pemerintah sangat penting bagi perekonomian. Kegiatan dapat memanipulasi kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan negara ini adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang.

Pertimbangan politik dan keamanan Pertimbangan kebijakan politik dan stabilitas suatu negara selalu menjadi salah satu tujuan terpenting dalam penyusunan anggaran negara. Keresahan politik dan bentrokan antar kelompok orang sering terjadi di berbagai negara di dunia. Situasi ini akan mengarah pada peningkatan

pengeluaran pemerintah yang sangat tajam, terutama ketika operasimiliter harus dilakukan.



b. keseimbangan

Berikut adalah keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor dibedakan dalam keadaan yaitu:

Tabel 15 Pajak Tetap dan Keseimbangan Pendapatan (dalam Triliun Rupiah)

Y	T	C	$S=y-(C+T)$	I	G	$AE=C+I+G$	EKONOMI
0	40	60	-100	120	60	240	ekspansi
240	40	240	-40	120	60	420	EKSPANSI
480	40	420	20	120	60	600	ekspansi

720	40	600	80	120	60	780	ekspansi
960	40	780	140	120	60	960	SEIMBANG
1200	40	960	200	120	60	1040	KONTRAKSI
1440	40	1040	260	120	60	1220	kontraksi

Sumber: Sukirno (2017)

Dapat dilihat keseimbangan ada diangka 960 T, dalam keseimbangan ini keinginan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa adalah sama denganperbelanjaan yang akan dilakukan dalam ekonomi yakni rumah tangga, para penanam modal dan pemerintah.

Tabel 16. Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan
(dalam TriliunRupiah)

Y	$T = 0,2 Y$	C	S	I	G	$AE = C + I + G$	EKONOMI
0	0	90	-90	150	240	480	EKSPANSI
240	48	234	-42	150	240	624	EKSPANSI
480	96	278	6	150	240	768	EKSPANSI
720	144	522	54	150	240	912	EKSPANSI
960	192	666	102	150	240	1056	EKSPANSI
1200	240	810	150	150	240	1200	SEIMBANG

1440	288	954	198	150	240	1344	KONTRAKSI
------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----------

Sumber: Sukirno (2017)

Keseimbangan ada di 1200 dimana $AE = Y$.

7. Masalah Makro Ekonomi dan Kebijakan Fiskal

Langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaan dengan maksud untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan fiskal. Dalam usaha untuk menunjukkan konsumsi kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, bagian ini akan menerangkan dua hal berikut :

- a. Menunjukkan bentuk masalah yang mungkin dihadapi dalam perekonomian.
- b. Menerangkan bentuk langkah kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomiyang dihadapi.

a. Bentuk Kebijakan Fiskal Diskresioner

Kebijakan fiskal yang terutama akan digunakan pemerintah untuk mengatasimasalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal diskresioner atau *discretionary fiscal policy*. Ia dapatlah diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluaranya atau pemungutan pakaknya dengan tujuan untuk :

- 1) Mengurangi grak naik turun tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu.
- 2) Menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi yang mencapai tingkat konsumsitenaga kerja yang tinggi, tingkat menghadapi masalah inflasi, dan selalu mengalami pertumbuhan yang memuaskan.

Dari penjelasan dari kebijakan fiskal diskresioner ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut :

- 1) Membuat perubahan-perubahan ke atas pengeluaranya, dan
- 2) Membuat perubahan-perubahan keatas pajak yang dipungutnya.

Pada kakikatnya kebijakan fiskal diskresioner dapat dibedakan didalam tigabentuk, yaitu:

- 1) Membuat perubahan ke atas pengeluaran pemerintah.
- 2) Membuat perubahan ke atas sistem pemungutan pajak.
- 3) Serentak membuat perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan sistempungutan pajak.

BAB 4

KESEIMBANGAN AD-AS

A. Tujuan Pembelajaran

Pembelajaran bab ke 4 ini memiliki tujuan agar mahasiswa mampu menganalisis AD-AS.

B. Uraian Materi

1. Keseimbangan AD-AS

Kata AD merupakan singkatan dari kata Agregate Demand atau permintaan agregat, dan AS adalah ringkasan dari istilah Agregate Supply atau penawaran agregat. Dalam analisis AD-AS penawaran agregat diartikan sebagai penawaran barang & jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam suatu negara. Berarti penawaran agregat sama dengan barang & jasa yang ditawarkan (diproduksikan) perusahaan-perusahaan dalam perekonomian.

Istilah permintaan agregat merupakan konsep yang baru. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Dengan demikian arti "permintaan agregat" adalah sangat berbeda dengan "pengeluaran agregat". Dari analisis dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional.

Dari sifat-sifat permintaan agregat (AD) dan penawaran agregat (AS) seperti yang diterangkan di atas dapatlah disimpulkan bahwa analisis AD – AS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan.

2. Dari Analisis KEYNESIAN Sederhana KE Analisis AD – AS

Perbedaan teori klasik dan teori keynes

Analisis keseimbangan pendapatan nasional merupakan analisis mengenai ketentuan kegiatan ekonomi yang dikenal sebagai “Analisis Keynesian Sederhana”.

a. Pandangan Klasik

Buku Keynes tersebut mengkritik pandangan ahli ekonomi klasik yang berkeyakinan bahwa perekonomian selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Menurut ahli ekonomi klasik, seperti dicontohkan oleh hukum say atau pandangan Jean Baptish Say seorang ahli ekonomi Perancis : “Supply creates its own demand” dalam bahasa Indonesia ungkapan ini dapat dinyatakan sebagai “penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan”. Maksudnya dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksi akan dapat terjual.

$$Y = f(K, L, Q, T)$$

Dalam masyarakat yang ekonominya selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk menggunakan faktor produksi yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, penentu produksi nasional dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut :

Dimana :

Y adalah pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian K adalah jumlah barang modal yang tersedia

L adalah jumlah tenaga kerja dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia

Q adalah jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan dan digunakan, dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi.

Dari pandangan ini selanjutnya dapat pula disimpulkan bahwa ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan : segi penawaran adalah sangat penting peranannya dalam menentukan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional sesuatu negara.

b. Pandangan Keynes : Permintaan Efektif dan Kegiatan Ekonomi

Analisis “Keynesian Sederhana” memperhatikan tentang bagaimana pengeluaran agregat yang berlaku dalam masyarakat akan menentukan kegiatan keseluruhan ekonomi dan pendapatan nasional. Dengan memisalkan harga-harga tidak mengalami perubahan, analisis tersebut menunjukkan bagaimana keseimbangan pendapatan nasional dicapai. Keseimbangan itu akan menentukan pendapatan nasional yang diwujudkan dalam perekonomian dan tingkat kesempatan kerja yang dicapai.

c. Pandangan Keynes : Uang dan Kegiatan Ekonomi

Ahli ekonomi klasik berpendapat “Money Is Neutral” atau “uang adalah netral” maksudnya Uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut ahli ekonomi klasik, kesempatan kerja penuh selalu dicapai. Teori Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi sangat berbeda dengan pendapat ahli ekonomi klasik. Bagi Keynes uang tidak netral. Artinya perubahan-perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Perbedaan pandangan ahli ekonomi klasik dengan Keynes mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi dan tingkat harga dapat dibedakan kepada dua aspek :

1) Perbedaan pandangan dalam penentuan suku bunga

Teori *loneable fund* atau dana dapat-pinjam menerangkan pandangan klasik mengenai penentuan suku bunga. Teori “tersebut menerangkan bahwa suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Kedua faktor tersebut ditentukan oleh suku bunga. Ada kritikan dari Keynes dimana menurut Keynes suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang.

2) Perbedaan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi (atau jumlah penawaran uang) kepada kegiatan ekonomi.

Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat uang tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan produksi nasional. Hal ini disebabkan oleh kesempatan kerja penuh sudah dicapai. Keynes, yang berkeyakinan bahwa kesempatan kerja penuh

jarang dicapai, berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dan kegiatan ekonomi akan mengalami suatu proses, yakni:

- a) Perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga , apabila jumlah uang bertambah suku bunga akan turun.
- b) Penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian.
- c) Pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat dan juga pertambahan pengeluaran agregat akan menambah pendapatan nasional.

3. Perkembangan Analisis AD – AS

a. Pandangan Pokok Teori makro ekonomi Keynesian

Apabila diperhatikan dengan lebih teliti mengenai pandangan yang terkandung dalam teori makroekonomi Keynesian atau Keynesian macroeconomis, secara kasarnya pandangan tersebut meliputi tiga aspek berikutini:

1) Peranan pengeluaran agregat

Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat- dan bukan faktor pengeluaran yang ada, akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi, pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu/ tahun tertentu. Analisis ini dinamakan keynesian sederhana atau simple keynesian. Dinamakan demikian karena analisisnya belum memperhatikan dua faktor: a) efek dari perubahan suku bunga, dan b) efek perubahan tingkat harga, kepada kegiatan ekonomi dalam suatu negara.

Analisis keynes merupakan analisis jangka pendek yang memperhatikan perubahan kegiatan ekonomi sebagai akibat dari perubahan pengeluaran agregat. Dalam analisis ini tidak memperhatikan perkembangan teknologi dan kualitas faktor-faktor produksi, jumlah dan kualitas faktor produksi dianggap tetap. Oleh sebab itu dalam analisis tersebut terdapat hubungan yang erat antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produksi nasional dan tingkat kesempatan kerja. Apabila pengeluaran agregat bertambah maka kegiatan ekonomi, produksi nasional dan kesempatan kerja meningkat. Peningkatan kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran.

2) Penentuan suku bunga dan peranan uang,

Peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi diterangkan oleh Keynes bahwa efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa:

- a) Efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga
 - b) Efek perubahan suku bunga ke atas investasi
 - c) Efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Rangkaian kegiatan ini dinamakan mekanisme transmisi.
- 3) Peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu tahun tertentu.

Analisis Keynesian sangat mementingkan peran pemerintah dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi: tanpa intervensi pemerintah, ekonomi akan mengalami hal-hal berikut ketika aktivitas ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar bebas :

- a) Ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh
- b) Terdapat perubahan besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu

Untuk menghadapi masalah ini , Keynesian menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam usaha mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tanpa inflasi.

b. Dua Kelemahan Penting Analisis Keynesian

- 1) Analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga-harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional.
- 2) Analisis Keynesian mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat, dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional.

4. Uang, Kegiatan Ekonomi dan Tingkat Harga

Pandangan ahli ekonomi klasik dan pandangan Keynes telah diterangkan bahwa mereka berpendapat apabila penawaran uang dalam ekonomi bertambah maka pertambahan itu akan menimbulkan kenaikan harga-harga yang sama tingkatnya dengan pertambahan penawaran uang.

Keadaan ini akan berlaku oleh karena:

- a. Perekonomian telah mencapai kesempatan kerja penuh
- b. Laju peredaran uang tetap
- c. Uang hanya digunakan untuk tujuan transaksi saja .

Maka dalam keadaan ini penambahan penawaran uang akan menaikkan tingkat harga. Analisis keynesian mengemukakan pendapat berbeda. Pandangan keynesian kurang memperhatikan efek penambahan penawaran uang terhadap harga. Keynes berkeyakinan bahwa dalam perekonomian yang menghadapi waktulah pengangguran yang tinggi, penambahan uang tidak akan menimbulkan efek buruk ke atas kestabilan harga.

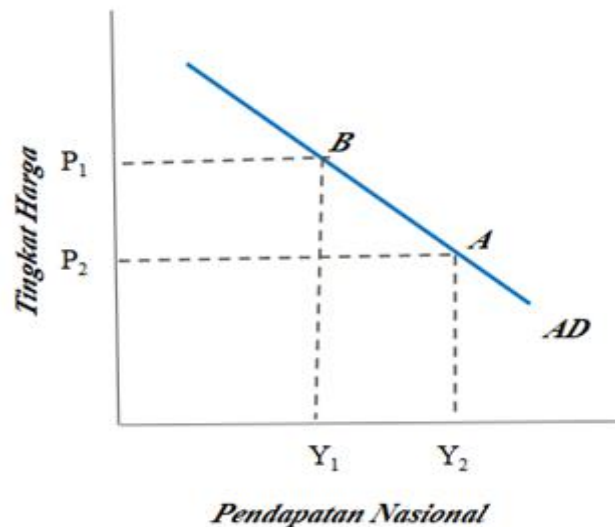
Oleh karena itu dalam analisis Keynes mengenai peranan uang dalam perekonomian selalu dianggap kenaikan penawaran uang tidak mengubah tingkat harga. Akan tetapi, juga bertentangan dengan pandangan klasik, keynes berpendapat penambahan penawaran uang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional.

Dalam membuat penilaian ke atas pandangan klasik dan keynes, golongan ahli ekonomi dikenal juga golongan monetaris, berpendapat pada dasarnya terdapat aspek positif dari kedua pandangan terdahulu. Mereka berpendapat: Pertambahan penawaran uang dapat mengakibatkan kenaikan harga dan juga kenaikan pendapatan nasional.

5. Kurva Permintaan Agregat (AD)

Dari sifatnya kurva AD dapat didefinisikan sebagai “suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam perekonomian”.

Sehingga bisa dibedakan konsep pengeluaran agregat dengan permintaan agregat. Pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap. Permintaan agregat berlaku pada harga berubah.



Gambar 8. Kurva AD

Dapat dilihat bahwa kurva AD akan terbentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan menyeluruh akan dipengaruhi oleh harga dan GDP atau pengeluaran rumah tangga riil.

Menurut Kennedy (2000), terdapat hubungan negatif antara tingkat harga keseluruhan dan permintaan agregat untuk barang dan jasa. Hal ini muncul karena tiga alasan:

- a. Efek kekayaan. Sebagian kekayaan orang disimpan dalam bentuk aset keuangan seperti uang tunai atau obligasi. Penurunan harga barang dan jasa berarti bahwa daya beli aset keuangan ini meningkat. Peningkatan kekayaan rakyat ini dapat menyebabkan mereka meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka. Misalkan, misalnya, Anda memiliki obligasi senilai \$ 10.000. Jika tingkat harga turun secara dramatis sehingga mobil sport yang semula berharga \$ 50.000 sekarang hanya berharga \$ 5.000, tidakkah Anda akan merasa cukup kaya untuk membeli mobil seperti itu? Secara umum, penurunan tingkat harga menyebabkan kekayaan mereka yang meminjamkan uang meningkat, mendorong mereka untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi mereka. Sebaliknya, peminjam mengalami penurunan kekayaan mereka dan, merasa lebih miskin, mengurangi konsumsi mereka. Penurunan ini cukup kecil, karena peminjam yang dominan, pemerintah, diasumsikan tidak mengubah pengeluarannya. Akibatnya, reaksi pemberi pinjaman menghasilkan efek kekayaan bersih pada konsumsi.
- b. Kekuatan internasional. Turunnya tingkat harga menyebabkan barang-barang kami menjadi lebih murah bagi orang asing dan barang-barang asing menjadi lebih mahal bagi kami. Akibatnya, permintaan untuk ekspor meningkat, dan kami mengalihkan

sebagian permintaan kami untuk impor ke barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri yang bersaing dengan impor.

- c. Pasokan uang nyata. Turunnya tingkat harga menyebabkan pasokan uang riil dalam perekonomian meningkat. Peningkatan uang ini berfungsi untuk meningkatkan permintaan agregat melalui beberapa saluran. Sebagai contoh, kenaikan pasokan uang riil menyebabkan harganya, tingkat bunga, turun. Suku bunga yang lebih rendah, pada gilirannya, menyebabkan orang untuk meningkatkan pengeluaran karena biaya pinjaman telah turun.

Penurunan tingkat harga menyebabkan peningkatan permintaan agregat. Dengan demikian, efek pengganda Keynesian, semakin meningkatkan permintaan agregat, sehingga penurunan moderat pada tingkat harga pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat dengan jumlah yang besar, menciptakan kurva permintaan agregat yang miring ke bawah. (Kennedy : 2000).

Sifat Utama Kurva AD

Kurva AD selalu merupakan suatu garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya semakin rendah tingkat harga, semakin besar permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Sifat AD yang menurun ke bawah disebabkan oleh beberapa faktor:

- a. Tingkat harga dan pengeluaran rumah tangga

Dalam suatu waktu tertentu tingkat pendapatan nominal masyarakat adalah tetap. Tingkat gaji dan upah dan jumlah kesempatan kerja akan menentukan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat pada suatu waktu tertentu. Apabila tingkat harga berbeda, daya beli pendapatan yang diperoleh adalah berbeda. Semakin rendah tingkat harga, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli. Bisa dikatakan: nilai riil pengeluaran agregat akan semakin meningkat apabila tingkat harga semakin rendah.

- b. Tingkat harga, suku bunga dan investasi

Pada umumnya terdapat hubungan yang cukup rapat antara perubahan tingkat harga dengan suku bunga. Apabila harga adalah stabil, atau tingkat inflasi sangat rendah, suku bunga cenderung akan berada pada tingkat yang rendah. Semakin

tinggi inflasi, suku bunga cenderung akan semakin menjadi tinggi. Pemilik modal akan berusaha untuk memperoleh suku bunga riil yang tetap besarnya dan ini dilakukan dengan menuntut suku bunga nominal yang lebih tinggi pada waktu inflasi yang semakin cepat.

Terdapat hubungan yang rapat pula antara suku bunga dengan investasi, yaitu semakin tinggi suku bunga akan menyebabkan penurunan dalam investasi. Kemerosotan investasi menyebabkan pengurangan pengeluaran agregat. Maka kenaikan harga menimbulkan :

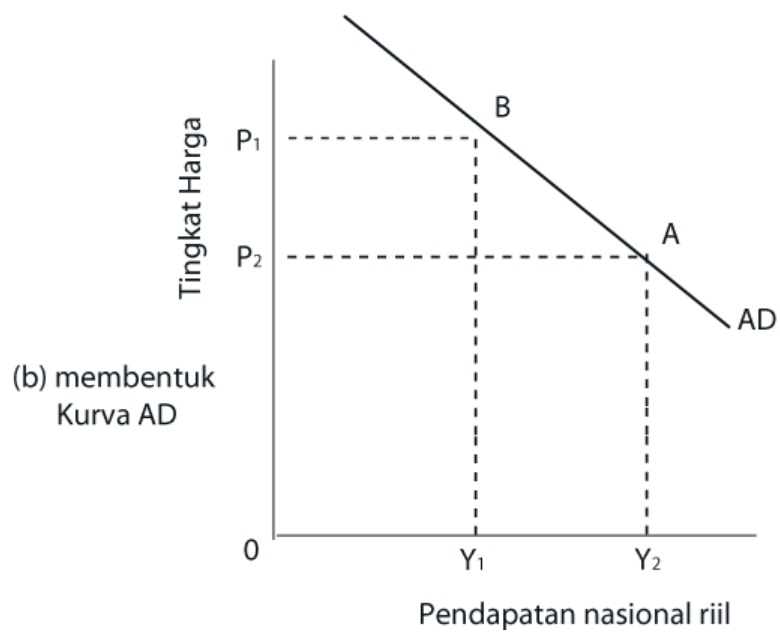
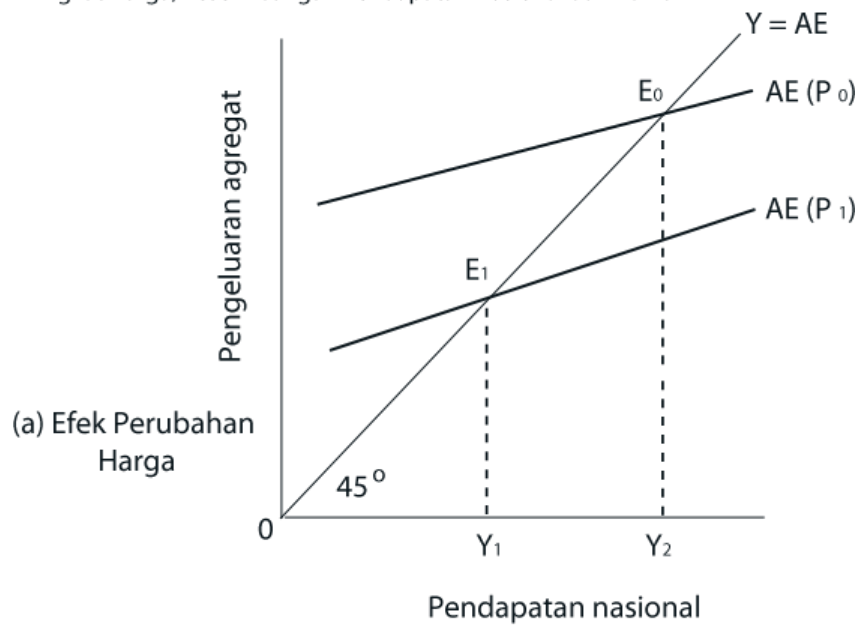
- 1) Harga naik menyebabkan suku bunga naik
- 2) Suku bunga naik menyebabkan investasi turun
- 3) Investasi merosot menyebabkan pengeluaran agregat dan pendapatannasional riil merosot.

c. Tingkat harga, ekspor dan impor

Berbagai negara terutama negara maju sektor industrinya, akan mengeluarkan barang yang sama jenisnya. Indonesia dan Thailand misalnya memproduksi sepatu, pakaian dan mobil. Maka tingkat harga akan menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan ekspor dan impor suatu negara. Bisa dikatakan:

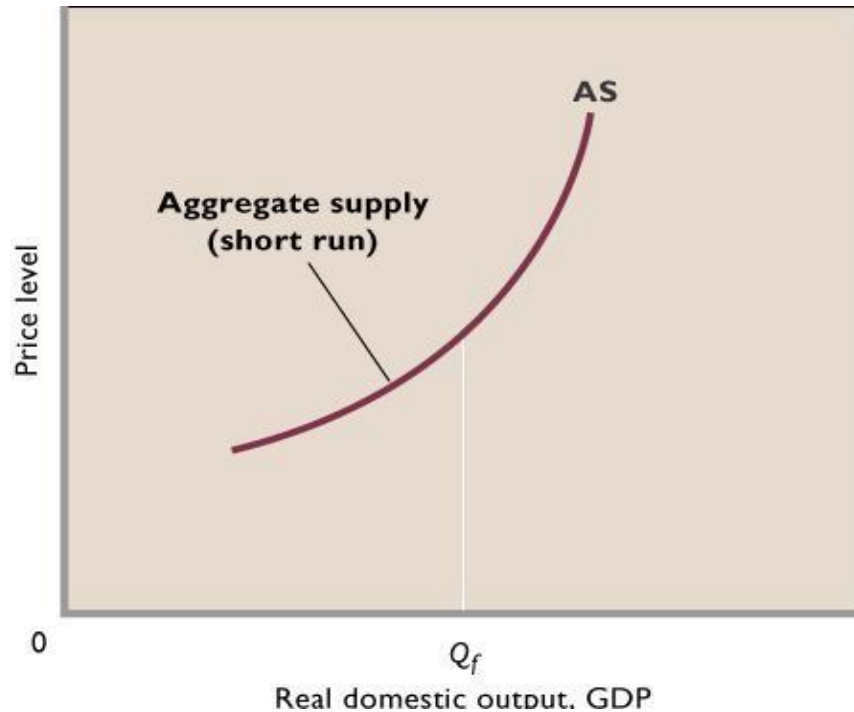
- 1) Apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih murah, ekspor meningkat, dan impor berkurang dan sebaliknya.
- 2) Apabila barang-barang dalam suatu negara adalah relatif lebih mahal ekspor akan merosot dan impor meningkat. Maka dapat disimpulkan:
 - a) Kenaikan harga akan menurunkan ekspor neto
 - b) Pengurangan ekspor neto akan menurunkan pengeluaran agregat dan pendapatan nasional riil.

Gambar 7.3
Tingkat Harga, Keseimbangan Pendapatan Nasional dan Kurva AD



Gambar 9. Tingkat Harga, Keseimbangan Pendapatan Nasional dan Kurva AD

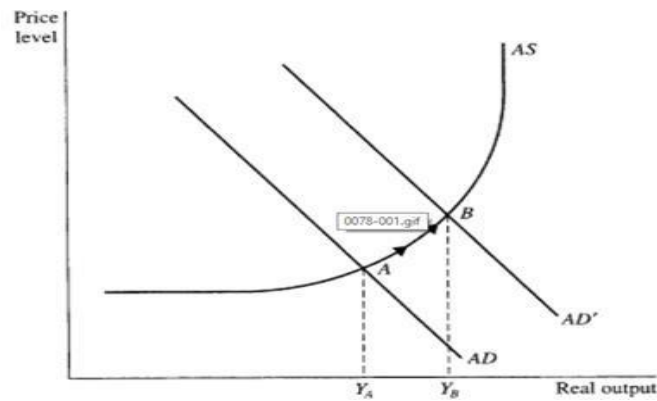
6. Kurva Penawaran Agregat (AS)



Gambar 10. Kurva AS

Dapat dilihat pada gambar diatas tampak bahwa garis AS terbentuk dari kiri bawah ke kanan atas. Faktor yang mempengaruhi adalah harga dan GDP atau pengeluaran riil rumah tangga.

Berikut adalah contoh kurva yang menunjukkan bagaimana kuantitas output dari perusahaan meningkat ketika tingkat harga keseluruhan meningkat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 11. Kurva AS-AD

Berdasarkan gambar di atas Apa pun yang meningkatkan biaya perusahaan menggeser kurva AS ke arah atas. Hasil ini terjadi karena perusahaan akan memasok output yang sama hanya jika mereka dikompensasi untuk biaya yang lebih tinggi dengan harga yang lebih tinggi. Kenaikan upah adalah contoh kenaikan biaya input yang menggeser kurva AS ke atas. (Kennedy: 2000).

a. Ciri-Ciri Kurva AS

- 1) Pada tingkat “pengangguran masih tinggi, kurva penawaran agregat AS relatif landai. Maksudnya, penambahan produksi nasional dapat dilakukan perusahaan” pada “harga relatif tetap karena a) tingkat penggunaan barang modal belum” mencapai kapasitas optimum, b) “upah masih relatif tetap. Tahap ini dicapai pada bagian AB dari kurva AS
- 2) Dari titik B hingga“ titik C “yaitu titik p`ada garis tegak pada tingkat kesempatan kerja penuh Kurva AS bertambah tingkat“ kenaikannya. Sebab : “Pengangguran sudah semakin merosot dan kapasitas pabrik-pabrik sudah mencapai optimum
- 3) Sesudah tingkat kesempatan kerja penuh kurva AS keadaannya semakintegak“

Kesimpulan: Kurva AS adalah suatu kurva yang berbentuk melengkung dari kiri =bawah ke kanan atas dengan tingkat kelengkungan semakin lama semakin tinggi. Berikut adalah gambar 12 tentang harga, pendapatan dan kurva AS:



Gambar 12. Harga, Pendapatan Nasional dan Kurva AS

b. Sifat Utama Kurva Penawaran Agregat (AS)

Bentuknya yang melengkung ke atas berarti semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah barang yang diproduksi dan ditawarkan para pengusaha. Faktor yang mempengaruhi bentuk kurva AS antara lain:

Dua penyebab kurva AS yang melengkung ke atas :

- 1) Ciri-ciri fungsi produksi
- 2) Ciri-ciri pasaran tenaga kerja

7. Faktor Yang Mempengaruhi Bentuk Kurva AS

a. Efek Hukum Hasil Tambahan Yang Semakin Berkurang"

Efek "hukum hasil tambahan yang semakin berkurang dalam jangka pendek, fungsi produksi dapat dinyatakan" dalam persamaan berikut :

$$Q=f(L)$$

Artinya : Jumlah output atau nilai produksi riil, ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan.

Fungsi produksi jangka pendek dipengaruhi hukum hasil tambahan yang semakin berkurang bila jumlah

tenaga kerja ditambah, produksi marjinal yang diciptakan oleh pertambahan tenaga kerja adalah lebih rendah dari tenaga kerja sebelumnya.

Oleh sebab itu perusahaan akan menambah produksi dan penawarannya hanya pada keadaan di mana harga semakin meningkat apabila output di tambah.

Pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat

Dalam menerangkan efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang ke atas ciri kurva penawaran agregat dimisalkan tingkat upah adalah tetap pada berbagai tingkat penggunaan tenaga kerja.

Semakin “tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional riil yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian.

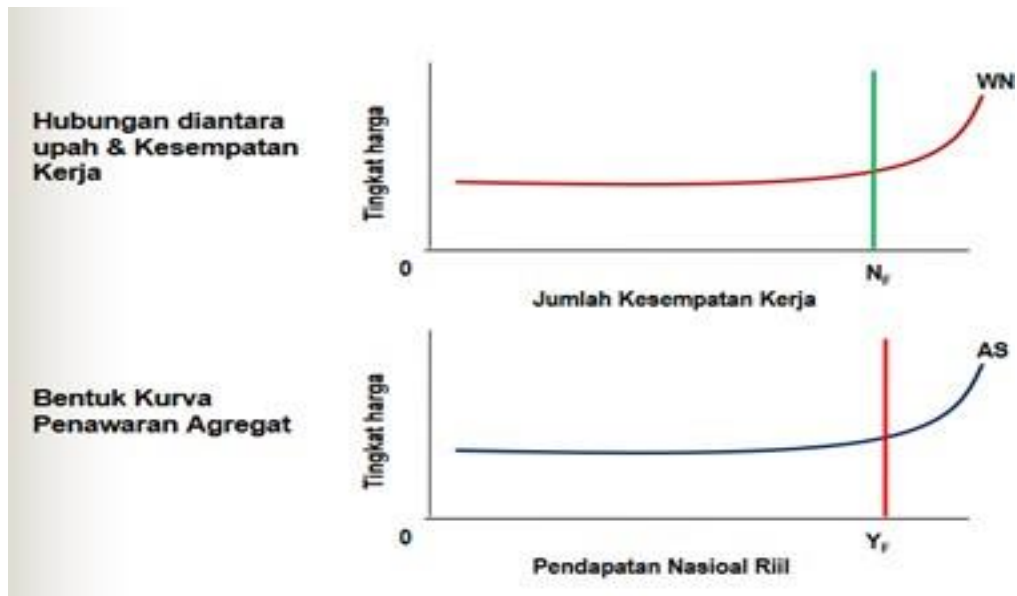
b. Tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah

Kenyataan sebenarnya yang berlaku dalam perekonomian memberikan dukungan “yang kuat kepada teori mengenai penentuan upah” di pasaran tenaga kerja. Dalam “makro ekonomi selalu diperkenalkan kurva philips, yaitu kurva yang menerangkan” ciri-ciri:

- 1) Hubungan “di antara tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran”
- 2) Hubungan di antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran.

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang negatif antara kenaikan tingkat upah dengan tingkat pengangguran. Kurva Philips yang menerangkan ciri perhubungan antara :

- 1) Tingkat kenaikan upah dan tingkat pengangguran
- 2) Tingkat inflasi dan tingkat pengangguran



Gambar 13. Hubungan Antara Upah dan Kesempatan Kerja

Dengan “menggunakan kurva philips dapat diterangkan :

- 1) Bentuk hubungan diantara upah dan tingkat kesempatan kerja
- 2) Bentuk kurva penawaran agregat

Berdasarkan Kurva Philips dapat disimpulkan

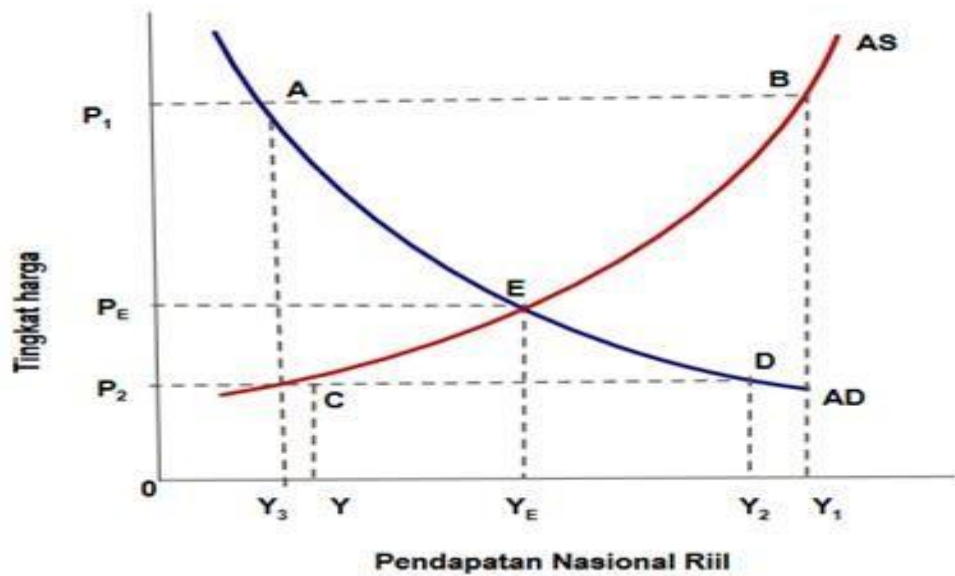
- 1) Semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi tingkat upah
- 2) Apabila tingkat kesempatan kerja semakin sangat tinggi yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, kenaikan tingkat upah menjadi cepat

8. Keseimbangan Permintaan-Penawaran Agregat (AD-AS)

Keseimbangan pendapatan nasional yang ada didalam analisis AD-AS dinamakan juga“ sebagai “Keseimbangan Makroekonomi” yang “berarti suatu analisis yang menerangkan bagaimana tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional riil dan tingkat harga umum ditentukan. Artinya :

- a. Dalam analisis AD-AS telah memasukan unsur perubahan harga dalam analisis keseimbangannya
- b. Perpotongan di titik E berarti permintaan agregat adalah sama dengan penawaran agregat pada pendapatan nasional riil sebanyak Y_e dan pada P_e

- c. Titik E merupakan kesimbangan yang akan di capai dalam perekonomian, karena “ perusahaan “tidak akan menambah atau mengurangi output yang“ diproduksi.



Gambar 14.

Keseimbangan Tingkat Harga dan Pendapatan Nasional Riil

Penyebab Perubahan Keseimbangan

a. Efek Perubahan Kurva AD

Perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional riil ke arah bersamaan yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot.

b. Efek Perubahan Kurva AS

Analisis mengenai perubahan kurva penawaran agregat AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional riil ke arah yang bertentangan.

Kesimpulan :

Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah dari analisis kurva AD-AS kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Dalam analisis AD-AS kelemahan teori Klasik dan Keynes diperbaiki. Teori Klasik pada dasarnya sangat menumpukan perhatian ke atas segi penawaran, manakala analisis Keynesian sangat menekankan kepada segi permintaan. Dalam analisis AD-AS kedua aspek ini-yaitu segi permintaan dan penawaran diperhatikan dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional (atau dalam penentuan kegiatan ekonomi negara). Permintaan agregat AD menunjukkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian pada berbagai tingkat harga. Manakala penawaran agregat AS menunjukkan pengeluaran barang dan jasa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan dalam suatu negara pada berbagai tingkat harga. Tingkat kegiatan ekonomi, pendapatan nasional dan kesempatan kerja ditentukan pada tingkat harga di mana permintaan agregat (AD) sama dengan penawaran (AS).

Dalam kurva analisis AD-AS ini bisa dilihat apabila kurva AD-AS saling berpotongan maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah kurva keseimbangan pendapatan nasional atau biasa disebut juga dengan keseimbangan makroekonomi. Tentunya keseimbangan ini akan berubah sesuai waktu dan kondisi. Secara analisis, perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: perubahan AD saja, perubahan AS saja, dan perubahan serentak atau secara berurutan dalam AD dan AS.

Kennedy (2000) menambahkan bahwa ada perbedaan antara kurva AD-AS dengan kurva mikro ekonomi. kurva permintaan ekonomi mikro dan kurva permintaan agregat adalah konsep yang sangat berbeda, sebuah fakta yang seringkali tersembunyi dari para siswa. Kurva permintaan ekonomi mikro didefinisikan sebagai menunjukkan bagaimana permintaan untuk barang atau jasa yang dipertanyakan berubah ketika perubahan harga, ceteris paribus (mis., Menahan semua pengaruh lain pada permintaan konstan).

Kondisi ceteris paribus ini tidak dipertahankan untuk kurva permintaan agregat, yang menunjukkan bagaimana permintaan agregat untuk semua barang dan jasa berubah ketika tingkat harga keseluruhan berubah. Memungkinkan tingkat output ekonomi berubah untuk mempertahankan kesetaraan dengan permintaan agregat. Akibatnya, kurva permintaan agregat lebih akurat digambarkan bukan sebagai kurva permintaan tetapi sebagai kurva yang menunjukkan kombinasi harga dan output yang sesuai dengan ekuilibrium di pasar barang dan jasa.

Sedangkan dalam kurva makroekonomi terdapat keindahan diagram penawaran-agregat / permintaan-agregat dimana memungkinkan dua pasar — pasar barang dan jasa dan pasar tenaga kerja dapat diilustrasikan dalam satu diagram.

BAB 5

UANG DAN INSTITUSI KEUANGAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab 5 ,diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan uang dan institusi keuangan, peranan bank umum,peranan bank sentral, dan perbandingan peranan bank umum dan bank sentral

B. Uraian Materi

1. Definisi Dan Ciri Ciri Uang

Di masa modern ini kehidupan tidak terlepas dari uang, fungsi uang dalam perekonomian adalah sebagai alat tukar menukar dalam perdagangan. Maka uang dapat di definisikan sebagai: “benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan”.Kata “disetujui” memiliki makna adanya kesepakatan di antara anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara tukar menukar dalam perdagangan. Benda yang disebut uang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Nilai nya tidak berubah berdasarkan waktu
- b. Ringan dibawa-bawa
- c. Praktis dengan nilai tetap
- d. Kuat
- e. Jumlahnya tidak banyak
- f. Kualitas Benda satu sama yang lain sama

Emas dan perak adalah harta yang memenuhi persyaratan di masa lalu sehingga dapat menjadi alat tukar menukar berabad abad lalu. Tapi semenjak berlakunya revolusi industri, perkembangan perdangan menjadi sangat pesat. Dan sebagai alat tukar menukar emas dan perak tidak dapat mengikuti pesatnya perdagangan yang ada. Maka dari itu bank mengeluarkan uang kertas (uang bank atau uang giral) sebagai alat tukar menukar. Uang giral atau uang kertas adalah uang yang diciptakan oleh bank-bank umum /bank perdagangan.

2. Perekonomian Barter Dan Perekonomian Uang

Dapat di artikan bahwa perekonomian barter adalah kegiatan produksi dan perdagangan yang masih sangat sederhana, kegiatan tukar-menukar masih sangat terbatas, dan jual beli dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang. Sedangkan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

Beberapa kelemahan perdagangan barter adalah seperti berikut ini:

a. Perekonomian barter memerlukan "Kehendak Ganda yang Selaras"

Artinya adanya dua materi, pihak yang ingin menukar dan pihak yang ingin membutuhkan

b. Penentuan harga sukar dilakukan

Dalam perdagangan barter aturan menaruh harga dengan satuan tertentu sukar dilakukan, dan nilai tukar tersebut harus dibuat oleh pihak yang melakukan pertukaran

c. Perdagangan barter menghalangi preferensi pembeli

Apabila dilakukan kisaran secara barter, seorang konsumen akan terikat kepada pembatasan yang ditentukan pihak lain yang menginginkan materi yang dimilikinya.

d. Menyulitkan pembayaran tertunda

Pembayaran tertunda atau kredit tidak dapat dilakukan karena akan timbul masalah dalam menentukan jenis barang dan harus di buat perjanjian mengenai jenis materi sebagai alat pelunasan

e. Sukar menyimpan kekayaan

Dalam perekonomian barter menyimpan harta harus dalam motif seperti rumah, ternak atau perhiasan yang memerlukan tempat penyimpanan yang besar.

Beberapa kesulitan yang dinyatakan dalam bagian yang lalu akan timbul ketikaitidak menggunakan uang sebagai alat perantara dalam perdagangan, dalam ilmu ekonomi peranan uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibagi menjadi empat(4), yaitu:

- a. Untuk memudahkan kegiatan tukar menukar
- b. Untuk menjadi perangkat nilai

- c. Untuk penundaan pembayaran
- d. Sebagai alat penabung nilai

Penjelesannya dapat diperhatikan sebagai berikut.

a. Uang Berfungsi Sebagai Perantara Tukar-Menukar

Keberadaan uang membuat kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan di dalam kegiatan perdagangan dilakukan secara barter. Adanya uang telah memungkinkan untuk mendapatkan materi yang diperlukan melalui orang yang memiliki materi tersebut dan selanjutnya memperoleh materi tersebut dengan menggunakan uang.

b. Uang Berfungsi Sebagai Perangkat Nilai

Suatu barang/materi dapat dengan mudah dinilai dengan keberadaan uang, yaitu dengan cara menukarkan sejumlah uang untuk barang tersebut. Disamping itu, besarnya uang dapat dijadikan pembandingan antara materi satu dengan materi lainnya.

c. Uang Berfungsi Sebagai Alat Bayaran Tertunda

Penggunaan uang dapat dilakukan penundaan karena pembayaran tersebut di masa yang akan datang akan sesuai dengan harapan. Uang sebagai alat pembayaran tunda dapat menstimulasi kemajuan perdagangan yang bersifat serupa.

3. Jenis Uang Sepanjang Sejarah

"Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia". Sejak manusia memajukan kebudayaannya ke luar dari "zaman batu", mereka telah menemukan berbagai bentuk barang yang dijadikan alat perantara dalam pembayaran. Detail berikut menerangkan secara pendek kelanjutan bentuk uang sejauh kemajuan manusia.

a. Jenis Uang Yang Pertama Digunakan

Sejak berabad lalu orang memanfaatkan uang sebagai alat pembayaran. Dahulu sekali uang yang digunakan berbentuk barang-barang kebutuhan dasar masyarakat seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang ternak atau acap kali berupa

perhiasan serupa kalung, sisir dan bedak; atau alat tempur sebagaimana pedang, pisau dan senjata lainnya.

b. Emas Dan Perak Digunakan Sebagai Uang

Selama sekitar 25 abad emas dan perak merupakan mata uang yang paling memukau oleh berbagai Negara untuk dijadikan alat pembayaran. Karakteristik alasan emas dan perak menjadi uang yang baik sebagai berikut :

1) Ciri-ciri Khusus Emas Dan Perak

Emas dan perak disukai banyak orang menyukai karena dapat dimanfaatkan sebagai aksesoris. Emas maupun perak mempunyai jenis yang sebanding yaitu barang yang tidak mudah hancur dan dapat dengan mudah dipecah bilamana dibutuhkan. Kuantitasnya sangat terpaku dan untuk mendapatkannya diperlukan anggaran dan upaya. Keduanya sangat stabil barangnya karena mereka tahan lama dan tidak mengalami kehancuran.

2) Kelemahan Menggunakan Emas Dan Perak Sebagai Uang

Kemajuan peradaban sesudah revolusi industri menghasilkan perekonomian berkembang dengan cepat. Peningkatan permintaan atas emas dan perak sebagai uang membuat beberapa kendala baru. Penyebabnya adalah :

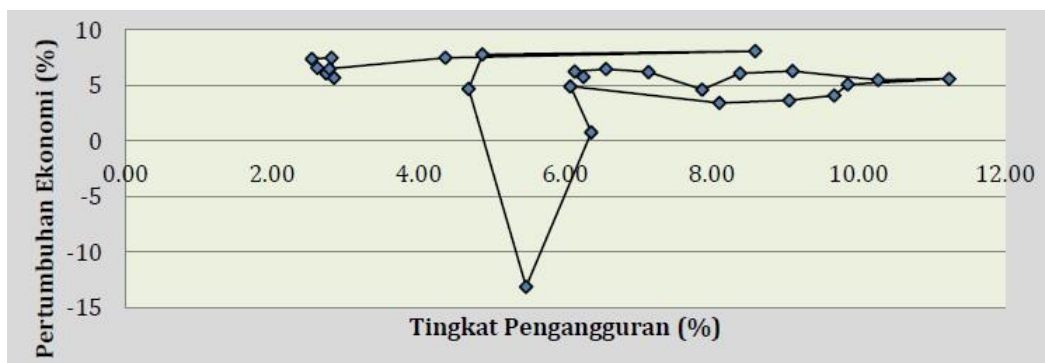
- a) Membutuhkan ruang yang besar pada saat transaksi
- b) Merupakan materi yang berat sehingga tidak sebanding untuk pertukar kalau nilai transaksi sedikit.
- c) Sukar untuk ditambah kuantitasnya

Disebabkan kelemahan dari penggunaan emas dan perak sebagai alat pembayaran, mulailah diperkenalkan uang kertas sebagai tipe uang yang baru. Perkembangan uang kertas sangat bertambah pesat sesudah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu menerima emas dari para nasabahnya. Perkembangan Uang Giral (UANG BANK) Sekarang ini bank umum tidak diberi kekuasaan lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas namun, ini bukan berarti kekuasaan untuk menciptakan uang sudah lenyap. Uang giral merupakan uang yang diciptakan oleh bank-bank umum yang sering disebut sebagai uang bank atau rekening koran. Oleh karena pengaruh bank-bank umum dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi masih kuat, sangat penting untuk mengetahui kegiatan mereka secara lebih mendalam.

Karena alasan ini, hubungan antara perubahan tingkat pengangguran dan inflasi di Indonesia menyimpang dari teori kurva Phillips. Alasan lain adalah bahwa kurva Phillips adalah jangka pendek, tetapi bukan jangka panjang. Karena dalam jangka pendek harga tetap masih berlaku, sedangkan dalam jangka panjang harga fleksibel berlaku. Dengan kata lain, pengangguran kembali ke tingkat alaminya, sehingga hubungan antara inflasi dan pengangguran positif.

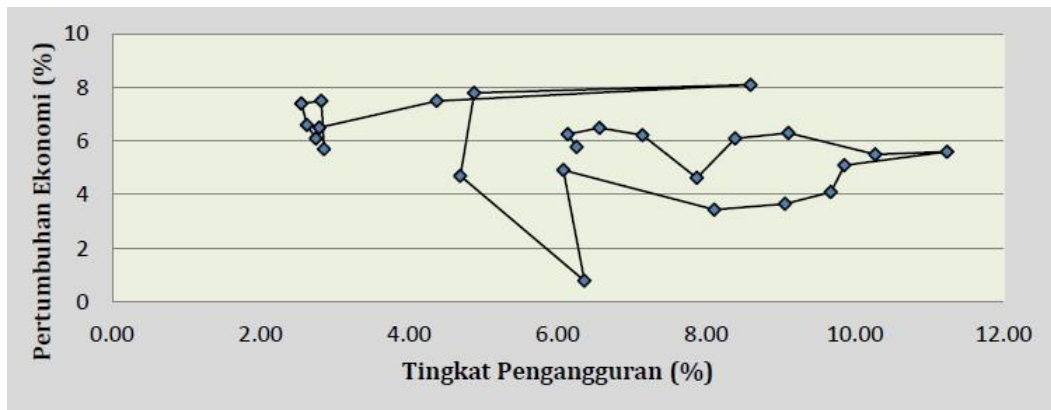
Perubahan tingkat pengangguran di Indonesia lebih tepat dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Karena itu pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh peningkatan kapasitas produksi yang dihasilkan dari peningkatan investasi. Dengan meningkatnya investasi, permintaan akan tenaga kerja akan meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan investasi akan berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 1988 dan 2013 adalah 4,99%, dengan tingkat pertumbuhan terendah pada 1998 selama krisis mata uang. Grafik hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terlihat seperti ini.



Gambar 31. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat pengangguran

Penggunaan data antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, seperti yang digunakan untuk penciptaan kurva Phillip (data dari tahun 1998 tidak digunakan karena memiliki nilai ekstrim), akan dapat menggambarkan bagaimana kurva pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran penampilan.



Gambar 32. Kurva Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Dari hasil penggambaran diagram sebaran antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Indonesia, terlihat bahwa hasilnya menggambarkan kecenderungan yang sesuai dengan gambaran Kurva Phillips.

Cara Menghitung Pengangguran Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja kita kira 15.000 sedangkan hanya 12.000 yang tergolong angkatan kerja dan yang memiliki pekerjaan hanya 11.000. Dari data di atas berapakah tingkat partisipasi angkatan kerja dan penganggurannya .

$$\text{Tingkat partisipasi angkatan kerja} = \frac{12000}{15000} \times 100\% = 80\%$$

15.000

$$\text{Jumlah Pengangguran} = 12.000 - 11.000 = 1.000$$

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{1.000}{12.000} \times 100\% = 8.33\%$$

12.000

8. Beberapa Tujuan Kebijakan Pemerintah

a. Tujuan Bersifat Ekonomi

Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama yaitu :

- 1) "Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru".
- 2) "Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat", dan
- 3) "Memperbaiki kesamarataan pembagaian pendapatan".

b. Tujuan Bersifat Sosial dan Politik

Tujuan mengatasi masalah sosial dan politik tidak kalah pentingnya daripada tujuan ekonomi. Tanpa stabilitas sosial dan politik, upaya untuk mengatasi masalah ekonomi tidak mudah dilakukan. Berikut adalah 3 masalah yang ingin Anda atasi melalui langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi pengangguran:

- 1) "Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga".
- 2) "Menghindari masalah kejahatan".
- 3) "Mewujudkan kestabilan politik".

9. Hubungan Inflasi Tinggi dan Kurva Phillips

Ingatlah bagaimana, pada 1970-an, kurva Phillips A.S. berubah ketika inflasi menjadi lebih persisten dan penetapan upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Pelajaran adalah yang umum. Hubungan antara pengangguran dan inflasi cenderung berubah dengan tingkat dan persistensi inflasi. Bukti dari negara-negara dengan inflasi tinggi mengkonfirmasi pelajaran ini. Tidak hanya cara pekerja dan perusahaan membentuk harapan mereka berubah, tetapi begitu juga pengaturan kelembagaan. Ketika tingkat inflasi menjadi tinggi, inflasi juga cenderung menjadi lebih bervariasi. Akibatnya, pekerja dan perusahaan menjadi lebih enggan masuk ke dalam kontrak kerja itu menetapkan upah nominal untuk jangka waktu yang lama. Jika inflasi ternyata lebih tinggi dari yang diharapkan, upah riil mungkin turun dan pekerja akan menderita pemotongan besar dalam standar hidup mereka.

Jika inflasi ternyata lebih rendah dari yang diharapkan, upah riil dapat meningkat tajam. Perusahaan mungkin tidak dapat membayar pekerja mereka. Beberapa mungkin bangkrut karena alasan ini, ketentuan perjanjian upah berubah dengan tingkat

inflasi. Upah nominal ditetapkan untuk periode waktu yang lebih pendek, turun dari satu tahun menjadi satu bulan atau bahkan kurang. Upah indeksasi, yang merupakan ketentuan yang secara otomatis meningkatkan upah sejalan dengan inflasi, menjadi lebih lazim. Perubahan-perubahan ini pada gilirannya mengarah pada respons yang lebih kuat dari inflasi terhadap pengangguran. Untuk lihat ini, contoh berdasarkan indeksasi upah akan membantu. Bayangkan sebuah ekonomi yang memiliki dua jenis kontrak kerja. Proporsi λ (huruf kecil Yunani lambda) dari kontrak kerja diindeks. Upah nominal dalam kontrak-kontrak tersebut bergerak satu per satu dengan variasi di tingkat harga aktual. Proporsi $1 - \lambda$ kontrak kerja tidak diindeks. Nominal upah ditetapkan berdasarkan inflasi yang diharapkan. Di bawah asumsi ini, persamaan menjadi:

$$\pi_t = [\lambda \pi_t + (1 - \lambda) \pi^e] - \alpha(u_t - u_n)$$

Istilah dalam tanda kurung di sebelah kanan mencerminkan fakta bahwa proporsi kontrak diindeks dan dengan demikian menanggapi π_t inflasi aktual, dan proporsi, $1 - \lambda$, merespons untuk inflasi yang diharapkan, π^e . Jika kita berasumsi bahwa inflasi yang diharapkan tahun ini sama dengan yang terakhir inflasi aktual tahun ini, $\pi^e = \pi_{t-1}$, kita dapatkan

$$\pi_t = [\lambda \pi_t + (1 - \lambda) \pi_{t-1}] - \alpha(u_t - u_n)$$

Ketika $\lambda = 0$, semua upah ditetapkan berdasarkan inflasi yang diharapkan — yang sama dengan inflasi tahun lalu, π_{t-1} — dan persamaan dikurangi menjadi persamaan:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = -\alpha(u_t - u_n)$$

Akan tetapi, ketika λ positif, proporsi upah ditetapkan berdasarkan actual inflasi daripada inflasi yang diharapkan. Untuk melihat apa artinya ini, atur ulang persamaan. Pindahkan istilah dalam tanda kurung ke kiri, faktor $1 - \lambda$ di sebelah kiri persamaan, dan bagi kedua belah pihak dengan $1 - \lambda$ untuk mendapatkan:

$$\pi_t - \pi_{t-1} = -\frac{\alpha}{(1 - \lambda)}(u_t - u_n)$$

Indeksasi upah meningkatkan efek pengangguran terhadap inflasi. Semakin tinggi proporsi kontrak upah yang diindeks — semakin tinggi λ — semakin besar pengaruhnya tingkat pengangguran memiliki perubahan inflasi — semakin tinggi

koefisien α . _____

$$(1-\lambda)$$

Intuisi adalah sebagai berikut: Tanpa indeksasi upah, pengangguran yang lebih rendah meningkat upah, yang pada gilirannya meningkatkan harga. Tetapi karena upah tidak merespons harga segera, tidak ada kenaikan harga lebih lanjut dalam tahun ini. Dengan indeksasi upah, namun, kenaikan harga menyebabkan kenaikan upah lebih lanjut dalam tahun tersebut, yang mengarah pada kenaikan harga lebih lanjut, dan sebagainya, sehingga efek pengangguran pada inflasi dalam tahun ini lebih tinggi.

Jika, dan kapan, λ mendekati angka 1 — saat itulah sebagian besar kontrak kerja mengizinkan indeksasi upah— perubahan kecil dalam pengangguran dapat menyebabkan perubahan besar dalam inflasi. Taruh yang lain cara, bisa ada perubahan besar dalam inflasi dengan hampir tidak ada perubahan dalam pengangguran. Inilah yang terjadi di negara-negara di mana inflasi tinggi. Hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi semakin lemah dan akhirnya hilang sama sekali.

BAB 10

KEBIJAKAN PEMERINTAH

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, jenis-jenis kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, alat analisis kebijakan fiskal, pengertian kebijakan moneter, jenis-jenis kebijakan moneter, instrument-instrumen kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, dan peran Bank Indonesia dalam kebijakan moneter.

B. Uraian Materi

Secara umum, masalah ekonomi suatu negara akan dihadapkan dengan masalah jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya mengacu pada masalah stabilisasi. Dalam jangka pendek bagaimana "mendorong" perekonomian dalam waktu singkat untuk menghindari tiga masalah makro, yaitu (1) masalah "inflasi", (2) masalah "pengangguran", dan (3) masalah "ketidaksetaraan dalam neraca pembayaran". Sedangkan masalah jangka panjang biasanya disebut sebagai "masalah pertumbuhan". Bagaimana kita bisa mengarahkan ekonomi dalam jangka panjang sehingga ada keseimbangan antara laju "pertumbuhan populasi", peningkatan "kapasitas produksi" dan akumulasi "dana investasi"? Namun, dalam jangka panjang, ini juga menunjukkan bagaimana menghindari masalah inflasi pengangguran dan ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dengan perspektif jangka panjang (5 tahun, 10 tahun atau 25 tahun).

Untuk mengatasi masalah jangka pendek, pemerintah akan mengambil tindakan, seperti: Misalnya peningkatan "sirkulasi" saham, penurunan "suku bunga", pengenaan "pajak impor", pengurangan "pajak penghasilan atau pajak penjualan", peningkatan "pengeluaran pemerintah" dan masalah hak emisi "obligasi pemerintah" dan begitu seterusnya. Tentu saja, jika Anda ingin mengatasi masalah jangka panjang, Anda juga perlu menerapkan kebijakan yang menangani masalah jangka panjang, seperti: B. Kebijakan tentang "kapasitas ekonomi agregat", "populasi dan tenaga kerja" serta tentang masalah sosial-politik yang ada - lembaga ekonomi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pengeluaran

pemerintah dan pajak yang dikenal sebagai kebijakan fiskal. Hubungan antara penawaran dan permintaan uang disebut kebijakan moneter.

1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Adalah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan guna mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja Negara sehingga sesuai dengan kondisi perekonomian yang sedang terjadi dan tujuan ekonomi yang hendak dicapai (Jamli, 1996: 114). Kebijakan fiskal yang dimaksud mencakup pengubahan besarnya pajak (Tx) atau pengeluaran pemerintah (G) atau pengubahan besarnya pajak dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama. Selanjutnya, Menurut Nanga (2005) menyatakan bahwa "kebijakan fiskal (fiscal policy) atau disebut juga kebijakan anggaran (budgetary policy) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui manipulasi instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah (G) dan/ atau pajak (T) yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian". Kebijakan fiskal disebut juga sebagai kebijakan ekonomimakro dengan tujuan :

- a. Membantu fluktuasi dari siklus usaha tidak besar
- b. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengangguranyang rendah.
- c. Menurunkan inflasi yang tinggi

Poin-poin di atas menunjukkan, arah kebijakan fiskal memang ditujukan untuk menstabilkan ekonomi dalam skala makro. Kondisi terakhir menunjukkan bahwa kebijakan fiskal juga ditujukan untuk mengurangi defisit anggaran. Pemerintah membuat kebijakan fiskal untuk memusatkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dalam konteks pajak jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada kondisi ekonomi dimana jika pajak diperkecil maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat menambah jumlah produknya. Jika pajak diperbesar maka akan memperkecil kemampuan beli masyarakat serta menurunkan tingkat output industri secara umum.

Pajak dan pengeluaran pemerintah yang berubah baik dari sisi tingkat dan komposisinya akan dapat mempengaruhi variabel-variabel diantaranya permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya, distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal dapat dibedakan ke dalam "kebijakan fiskalaktif

atau diskresioner (discretionary fiscal policy)" dan "kebijakan fiskal yang pasif atau nondiskresioner (nondiscretionary fiscal policy)".

Kebijakan fiskal diskresioner adalah pemerintah melakukan kebijakan melalui perubahan tingkat "pajak" atau program-program "pengeluarannya", dan terbiasa disebut ekspansif (expansionary fiscal policy) ataupun kontraktif (contractionary fiscal policy). Kebijakan fiskal ini, melalui peningkatan pengeluaran pemerintah (G) dan/atau penerimaan pajak (T), dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan fiskal yang kontraktif adalah kebijakan fiskal yang dilakukan melalui pengeluaran pemerintah (G) dan/atau peningkatan penerimaan pajak (T) dengan tujuan untuk menurunkan tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Menurut Tulus TH Tambunan (2006) mengatakan bahwa kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN lainnya. Defisit APBN terjadi apabila penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ; pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.

Menurut Norpin (1987) bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan utama adalah mempengaruhi besar dan susunan permintaan agregat dengan indikator budget defisit yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer) dengan penerimaan terutama dari pajak.

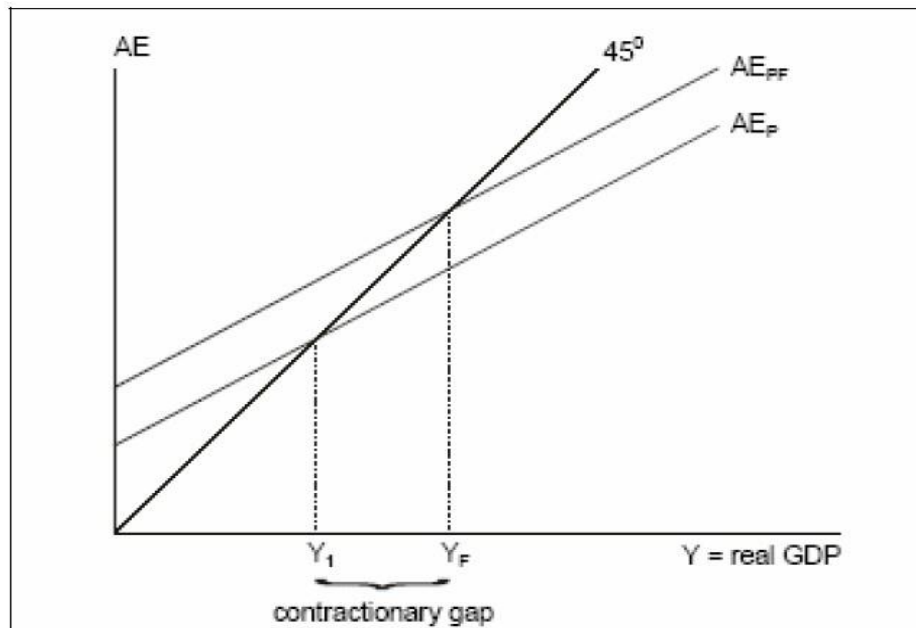
Perubahan tarif pajak akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak dikecilkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Sebaliknya pajak ditingkatkan maka akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

a. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal : Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih bagus melalui perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pada saat munculnya "kontraksional gap". Kontraksional gap adalah kondisi di saat output potensial

(Y_p) lebih tinggi dibandingkan dengan output Actual (Y_1). Tingginya tingkat F

pengangguran merupakan ciri pada saat terjadi kontraksional gap atau $U_{actual} > U_{alamiah}$



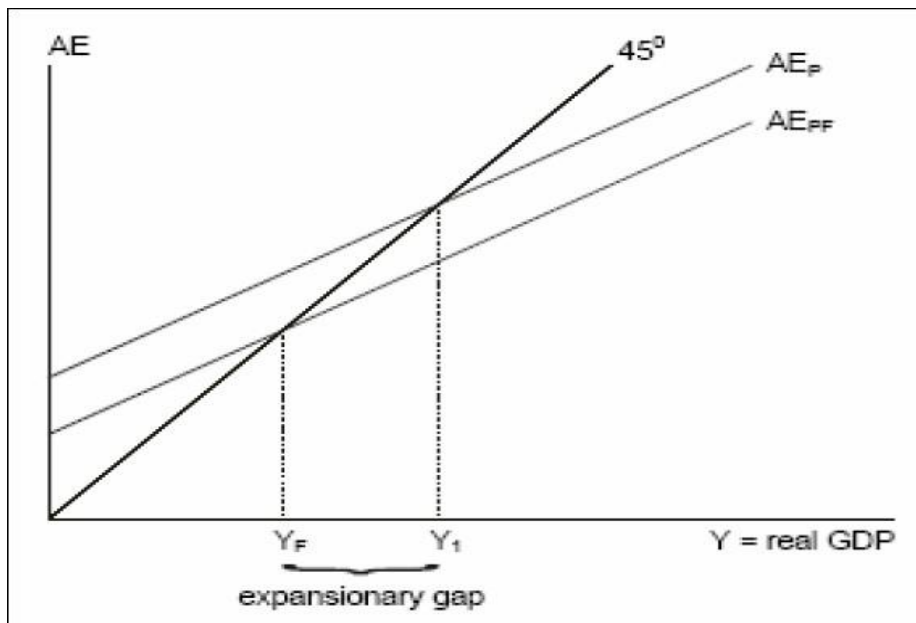
Gambar 44. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Pengangguran terjadi karena kelesuan dari industri-industri untuk memproduksi barang yang diakibatkan tidak adanya sumber pemasaran baru dan juga disebabkan daya beli masyarakat yang menurun dalam membeli produk. Namun disisi lain biaya produksi semakin mahal maka kebijakan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan pada kondisi ini diantaranya melakukan pemutusan hubungan tenaga kerja. Disamping itu juga terjadi penurunan investasi yang dilakukan oleh perusahaan sehingga menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja.

Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) atau menurunkan pajak (T) untuk menambah tingkat output (Y), adapun mekanisme peningkatan pengeluaran pemerintah ataupun penurunan pajak (T) terhadap output adalah sebagai berikut, pada gambar 1 maka dapat dijelaskan bahwa disaat pengeluaran pemerintah (ΔG) naik atau selisih pajak (ΔT) turun maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat keatas sehingga pendapatan akan naik dari (Y) menjadi (Y_f).

b. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal : Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan pemerintah melalui penurunan belanja negara (G) dan menaikkan tingkat pajak (T). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi daya beli masyarakat dan mengontrol inflasi. Kebijakan pemerintah ini bagaimana pemasukan kepada negara lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan.pada saat munculnya ekspansinary gap. Ekspansinary gap adalah suatu kondisi dimana output potensial (Y) lebih kecil dibandingkan dengan output Actual (Y_1). Pada gambar 45, mekanisme penurunan pengeluaran pemerintah (G) ataupun kenaikan pajak (T).pada grafik disaat pengeluaran pemerintah (ΔG) turun atau selisih pajak (ΔT) naik maka akan menggeser kurva pengeluaran agregat kebawah sehingga pendapatan akan turun dari (Y) menjadi (Y_f).

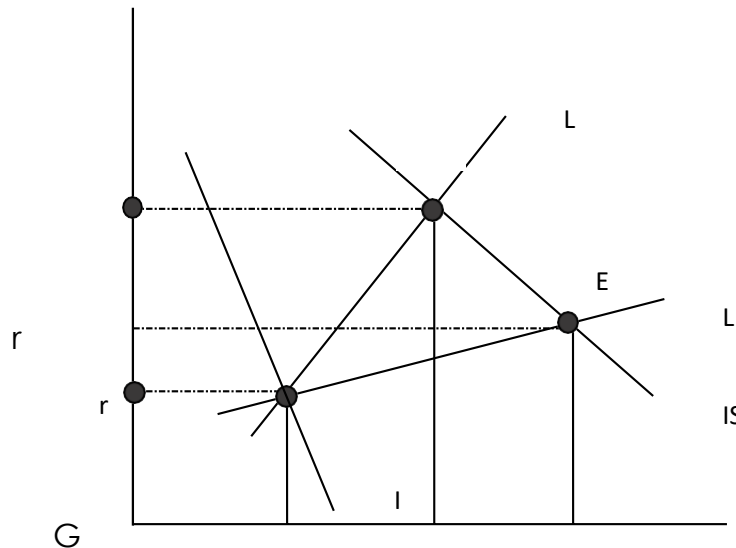


Gambar 45. Kebijakan Fiskal Kontraktif

c. Tujuan Kebijakan Fiskal

Tujuan kebijakan fiskal secara umum adalah dicapainya kestabilan ekonomi yang mantap dan untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak sehingga tingkat

pengangguran alamiahnya. Dengan kata lain kebijakan fiskal bertujuan agar pendapatan nasional riil terus naik pada laju pertumbuhan pendapatan nasional riil potensialnya yaitu laju pertumbuhan yang selaras dengan perubahan teknologi dan perubahan jumlah faktor produksi dengan tetap dipertahankannya kestabilan harga-harga umum.



Gambar 46. Grafik Efektivitas Kebijakan Fiskal

Pada grafik 44 diatas, Kurva LM yang memiliki slope/kemiringan yang berbeda kurva LM_1 memiliki kemiringan yang lebih kecil daripada kurva LM_2 . Karena kemiringan LM_1 lebih kecil maka kurva LM_1 akan lebih landai daripada kurva LM_2 . Misalnya pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menaikkan G sejumlah tertentu sedangkan T_r dan T_x tetap. Kenaikan G akan reaksi selesai, kurva IS yang baru, IS_2 , hanya sampai pada titik E_2 bila keseimbangan pasar uang adalah seperti yang ditunjukkan oleh kurva LM_2 tetapi bila keseimbangan pasar uang diwakili oleh kurva LM_1 , peningkatan jumlah G yang sama akan menggeser kurva IS hingga mencapai titik E_1 . bila kita bandingkan antara titik E_1 dan E_2 terlibat bahwa kenaikan GDP pada titik E_1 lebih tinggi daripada titik E_2 .

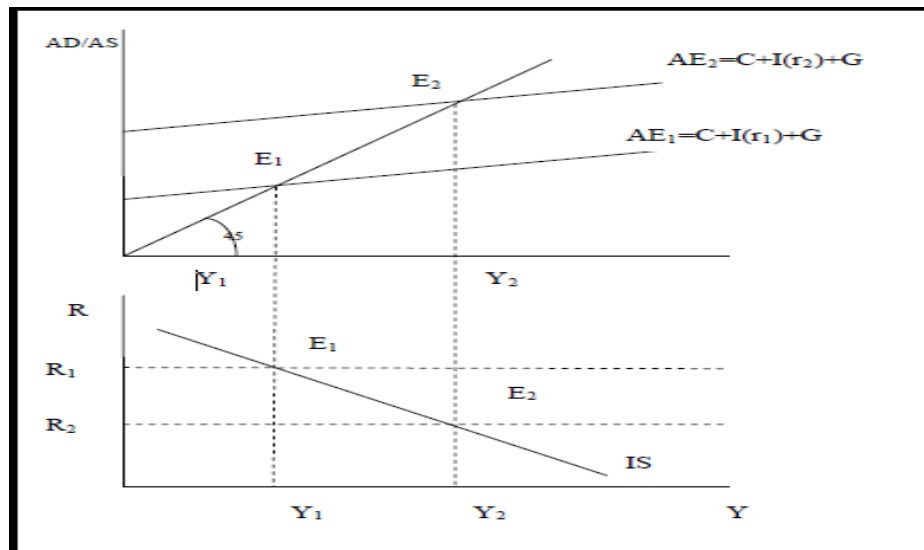
Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka peluang kerja melalui kegiatan negara dalam bentuk pengeluaran untuk barang, jasa dan proyek. Dana yang digunakan untuk pengeluaran barang, jasa dan proyek yang dirujuk berasal dari pajak dan sumber pendanaan lainnya, seperti:
- 2) Menjaga inflasi melalui stabilitas harga. Pemerintah membuat kebijakan dengan menetapkan harga terendah dan tertinggi dari suatu komoditas, seperti: Sebagai contoh, harga beras giling kering dan harga minyak goreng dalam jumlah besar.
- 3) Mendorong investasi melalui insentif pajak dan pengembangan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara.
- 4) Menetapkan pedoman untuk menerapkan tarif pajak untuk mengendalikan inflasi
- 5) Menjaga stabilitas ekonomi di tengah-tengah krisis global; Melalui subsidi, menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mengendalikan pengeluaran pemerintah.
- 6) Distribusi pendapatan nasional untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan memperkenalkan tarif pajak progresif

d. Kurva IS : Alat Analisis Kebijakan Fiskal

Pasar barang merupakan tempat dimana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dan dalam jangka waktu tertentu. Permintaan pasar barang merupakan penjumlahan dari semua permintaan akan barang dan jasa di dalam negeri, sementara yang menjadi penawarannya adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri. Kurva IS merupakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Kurva IS juga menyatakan "investasi" dan "tabungan". Dalam sistem ekonomi tertutup, identitas output agregat merupakan penjumlahan konsumsi rumah tangga, konsumsi perusahaan dan konsumsi pemerintah, yaitu: $Y = C + I + G$ dengan Y = output riil agregat, C = konsumsi riil rumah tangga, I = konsumsi riil perusahaan, dan G = konsumsi riil pemerintah. Fungsi konsumsi riil rumah tangga dan konsumsi riil perusahaan masing-masing

adalah $C = [C(Y-T)]R$ dimana $Y - T$ = pendapatan disposable riil, dan R = tingkat bunga nominal.



Gambar 47. Grafik bekerjanya kebijakan fiskal (kurva IS)

Penjelasan Grafik:

- 1) Untuk tingkat bunga pada R_1 maka kurva permintaan agregat adalah pada kurva $a + bY + e - f.R_1$, maka pendapatan nasional equilibrium pada Y_1
- 2) Pada titik E_1 pada diagram pertama terbentuk dari perpotongan antara kurva $a + bY + e - f.R_1$ dan garis 45°
- 3) Pada titik E_1 pada diagram kedua merupakan perpotongan garis yang ditarik dari titik E_1 pada diagram pertama dengan garis R_1 pada diagram kedua.
- 4) Jika tingkat bunga pada R_2 , maka kurva permintaan agregat adalah pada kurva $a + bY + e - f.R_2$, pendapatan nasional equilibrium pada Y_2
- 5) Pada titik E_2 pada diagram pertama terbentuk dari perpotongan antara kurva $a + bY + e - f.R_2$ dan garis 45°
- 6) Pada Titik E_2 pada diagram kedua merupakan perpotongan garis yang ditarik dari titik E_2 pada diagram pertama dengan garis R_2 pada diagram kedua.
- 7) Dengan menghubungkan titik E_1 dan E_2 pada diagram kedua, didapatkan kurva IS.

Kebijakan fiskal bisa dikatakan efektif jika mampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan, pertama-tama terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa.

Tabel 21. Efektivitas Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Tingkat Bunga

	Kurva LM Elastis Sempurna (Interval Keynes)	Kurva LM Positif (Interval Antara)	Kurva LM Inelastis Sempurna (Interval Klasik)
Kurva IS Elastis Sempurna	Tidak Terdefinisikan	Fiskal Ekspansif : Y naik r naik Fiskal Kontraktif : Y Turun r turun	Kebijakan Fiskal Tidak Efektif Sempurna Fiskal Ekspansif : Y tetap r naik
Kurva IS Negatif	Kebijakan Fiskal Efektif Sempurna Fiskal Ekspansif : Y naik r tetap Fiskal Kontraktif : Y Turun r tetap	Fiskal Ekspansif : Y naik r naik Fiskal Kontraktif : Y Turun r turun	Kebijakan Fiskal Tidak Efektif Sempurna Fiskal Ekspansif : Y tetap r naik
Kurva IS Inelastis Sempurna	Kebijakan Fiskal Efektif Sempurna Fiskal Ekspansif : Y naik r tetap Fiskal Kontraktif : Y Turun r tetap	Fiskal Ekspansif : Y naik r naik Fiskal Kontraktif : Y Turun r turun	Tidak Terdefinisikan

2. Moneter

a. Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter merupakan langkah dalam mengendalikan keadaan ekonomi dalam konteks makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dengan cara pengaturan “jumlah uang yang beredar” dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Kebijakan moneter bisa dijelaskan sebagai proses mengelola stock uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan laju inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter juga menjelaskan dalam upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik melalui mengatur jumlah uang yang beredar. Sedangkan yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol). Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh sekaligus mengendalikan inflasi (Rahardja dan Manurung, 2008:256).

b. Jenis – Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan pemerintah dalam moneter dapat dibagi menjadi dua, yaitu Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Ekspansive Policy) merupakan kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Kontraktif Policy) merupakan suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan “kebijakan uang ketat” (tight money policy).

c. Instrumen Kebijakan Moneter

Tingkat diskonto adalah pinjaman bank sentral ke "bank komersial" untuk mengatasi masalah likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana sementara (diskon window). Bank-bank komersial terkadang memiliki kekurangan uang, sehingga mereka perlu meminjam dari bank sentral. Untuk meningkatkan jumlah uang, bank sentral menurunkan tingkat bunga pada bank umum dan sebaliknya

meningkatkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar

Persyaratan cadangan wajib adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank untuk memegang sejumlah uang tunai (cadangan) pada persentase tertentu dari utang jangka pendek mereka. Semakin rendah persentase, semakin besar kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada konsumen pada skala yang lebih besar dengan likuiditas (cadangan). Semakin tinggi persentase, semakin rendah kemampuan bank untuk memberikan pinjaman kepada konsumen.

Cadangan ini dapat dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk rekeningkoran dengan Bank Sentral. Biasanya, cadangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu cadangan primer dan sekunder. Cadangan minimum yang diperlukan lebih terkait dengan cadangan primer. Sementara itu, cadangan sekunder ditambahkan, yang biasanya terdiri dari sekuritas. Persentase persyaratan cadangan mempengaruhi kekuatan ekspansi kredit. Jika bank sentral menguranginya, kapasitas ekspansi kredit bank umum meningkat, sehingga jumlah uang beredar meningkat. Di sisi lain, jika persentasenya meningkat, ekspansi kredit bank umum berkurang dan jumlah uang beredar berkurang.

Banding moral (keyakinan moral); Panggilan ini adalah pernyataan oleh bank sentral (misalnya Gubernur Bank Indonesia), yang meneruskan atau memberikan lebih banyak informasi makro. Informasi tersebut digunakan sebagai masukan oleh bank komersial dalam pengelolaan aset dan liabilitas mereka. Instrumen ini akan mendukung efektivitas langkah-langkah kebijakan moneter bank sentral lainnya. Jika banding ini tidak mengikat karena itu bukan aturan yang mengikat untuk bank komersial.

Operasi pasar terbuka adalah operasi yang dilakukan oleh bank sentral dengan membeli dan menjual sekuritas jangka pendek. Tujuan dari operasi ini adalah untuk mengatur persediaan uang atau suku bunga jangka pendek. Suku bunga acuan yang digunakan Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka disebut suku bunga BI. Suku bunga BI adalah suku bunga acuan yang mencerminkan kebijakan atau kebijakan Bank Indonesia dan dipublikasikan.

Mempertimbangkan faktor ekonomi lainnya, Bank Indonesia umumnya akan menaikkan BI rate jika inflasi di masa depan kemungkinan akan melebihi targetnya. Sebaliknya, Bank

Indonesia akan menurunkan BI rate jika inflasi di masa depan kemungkinan akan di bawah target yang ditetapkan.

d. Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter memiliki tujuan utama dalam menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga. Prakteknya, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antarlain "operasi pasar terbuka" di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan "tingkat diskonto", penetapan "cadangan wajib minimum", dan pengaturan "kredit atau pembiayaan". Tujuan lain dari kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akandirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil

e. Tujuan dan Peran Bank Indonesia dalam Kebijakan Moneter

Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah beberapa kali diubah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang tentang Bank Indonesia), Pasal 7, di dalamnya Stabilitas Bank Indonesia untuk mencapai dan mempertahankan nilai rupiah. Stabilitas nilai rupiah mencakup dua aspek, yaitu (a) stabilitas nilai rupiah terhadap barang dan jasa, yang tercermin dalam tingkat inflasi, dan (b) stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang lain, yang tercermin dalam perkembangan nilai tukar.

Untuk mencapai tujuan ini, sejak 2005, Bank Indonesia telah memperkenalkan kerangka kerja kebijakan moneter dengan inflasi sebagai tujuan utama kerangka kerja penargetan inflasi dengan memperkenalkan rezim nilai tukar mengambang. Peran stabilitas nilai tukar sangat penting untuk stabilitas harga dan sistem keuangan. Untuk alasan ini, Bank Indonesia juga menerapkan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan dan menjaga nilai tukar pada tingkat tertentu. Dalam implementasinya, Bank Indonesia diberdayakan untuk mengambil tindakan moneter dengan menetapkan target moneter (seperti uang dan suku bunga) dengan tujuan utama mempertahankan target inflasi pemerintah.

Instrumen yang digunakan dalam manajemen operasional target moneter ini meliputi transaksi pasar uang Rupiah dan mata uang asing, penetapan tingkat diskonto, persyaratan cadangan dan penyediaan pinjaman atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat menerapkan metode pengendalian kebijakan moneter berdasarkan hukum Syariah.

Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia, adalah pembuat kebijakan tunggal. Stabilitas nilai moneter adalah tujuan kebijakan moneter. Stabilitas nilai moneter adalah tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia. Dalam implementasinya, Bank Indonesia memiliki tugas mengatur peredaran uang di Masyarakat sebagai berikut:

- 1) Jika Bank Sentral menginginkan peningkatan jumlah uang yang beredar di Komunitas, Bank Sentral membeli sekuritas dari bank komersial dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Pemerintah (Surat Berharga / SBN dan Surat Berharga Negara / SUN). Sebaliknya, bank sentral akan menjual sekuritas ke bank komersial dan publik jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang di Komunitas.
- 2) Jika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang di Komunitas, bank sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman kepada bank komersial, sehingga biaya / bunga yang harus dibayar oleh bank komersial menjadi lebih murah. Bank-bank komersial, pada gilirannya, dapat memberikan pelanggan mereka pinjaman berbunga rendah. Ketika suku bunga pinjaman bank turun, permintaan publik untuk kredit bank meningkat dan ini mengarah pada peningkatan jumlah uang beredar.
- 3) Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, bank sentral akan meminta bank komersial untuk meningkatkan cadangan minimum mereka. Peningkatan cadangan ini mengurangi deposito mata yang dapat dibuat oleh bank dan secara otomatis mengurangi jumlah uang beredar dan sebaliknya

Secara umum, kerangka kerja kebijakan moneter terdiri dari instrumen, tujuan operasional, tujuan menengah dan tujuan akhir. Tujuan menengah diperlukan karena, untuk mencapai tujuan akhir, ada periode waktu antara implementasi kebijakan moneter dan pencapaian tujuan akhir. Oleh karena itu, perlu untuk memiliki indikator yang hasilnya lebih mudah diidentifikasi untuk mengidentifikasi indikasi kebijakan yang biasa disebut sebagai tujuan menengah. Tujuan menengah yang dipilih harus memiliki hubungan yang stabil dengan tujuan akhir.

Beberapa opsi target yang dapat digunakan termasuk uang seperti M1, M2 atau suku bunga pinjaman dan suku bunga. Selain itu, bank sentral membutuhkan target operasional untuk mencapai tujuan sementara sehingga proses transfer dapat berjalan sesuai rencana. Tujuan operasional yang dipilih harus dalam hubungan yang stabil dengan tujuan antara dan dikendalikan oleh otoritas moneter. Informasi harus tersedia sebelum singgah.

Tujuan operasional kebijakan moneter tercermin dalam pengembangan suku bunga untuk pasar uang antar bank overnight (PUAB O / N). Mengikuti perkembangan suku bunga PUAB, suku bunga simpanan dan karenanya suku bunga pinjaman bank harus berkembang. Beberapa opsi target operasional yang dapat digunakan termasuk uang primer (M0) dan suku bunga jangka pendek.

Instrumen uang adalah instrumen bank sentral yang dapat mempengaruhi sasaran operasional yang ditetapkan. Beberapa instrumen yang digunakan termasuk operasi pasar terbuka, persyaratan cadangan, fasilitas diskon dan permohonan moral.

Ini adalah serangkaian langkah yang diambil oleh bank sentral, dari menentukan dan memperkirakan tujuan akhir, untuk memantau variabel ekonomi dan fiskal yang membentuk dasar untuk perumusan kebijakan moneter, hingga menerapkan pengawasan kebijakan moneter di pasar keuangan. Untuk mencapai tujuan akhir disebut kerangka kebijakan moneter operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, A. (2006). "Analisis Kebijakan Moneter Dalam Menstabilkan Inflasi Dan Pengangguran Di Indonesia". Skripsi. Institut Pertanian Bogor.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2013). *Macroeconomics*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Eachern, MA. (2000). *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*, PT. Salemba Empat Jakarta.
- Jamli, A. (2001). "**Teori Ekonomi Makro**". BPFE Yogyakarta. Yogyakarta.
- Karya, Detri & Syamsuddin, S (2016). "Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen". Jakarta: Rajawali Press, Edisi satu, Cetakan Pertama.
- Karya, D., & Syamsuddin, S. (2017). *MAKRO EKONOMI Pengantar untuk Manajemen Edisi 2*. Jogja: Rajawali Press.
- Kedeputan Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bapenas. (2018). *Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2018*. Edisi Vol.2, No.1. Mei 2018. Bapenas. Jakarta.
- Kennedy, P. E (2000). "Macroeconomic Essentials- Understanding Economics in The News". London: The MIT Press.
- Latumaerissa, J. R (2015). "Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muchtolifah. (2009). *Ekonomi Makro*. Unesa University Press. Jakarta.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter*. Edisi ke-4. BPFE. Yogyakarta.
- Prayitno, S. (2000). *Ekonomi Makro*, BPFE. Yogyakarta.
- Rahardja, P & Manurung, M. (2008). "Suatu Pengantar Teori Ekonomi Makro". Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Rahardja, P (2017). "Pengantar Ilmu Ekonomi (Makroekonomi dan Mikroekonomi)". Edisi Ketiga. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2018). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Salvatore. D. (1997). *Ekonomi Internasional Edisi Kelima*. Penerjemah Haris Munandar. Erlangga, Jakarta.
- Salvatore, D., (2008). *Theory and Problem of Micro Economic Theory*. 3rd Edition. Alih Bahasa oleh Rudi Sitompul. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Soelistyo (1993), "Ekonomi Internasional : Pengantar Lalu lintas Pembayaran Internasional", Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta.

- Sukirno, S., (2001). Pengantar Teori Makroekonomi,ed. 2.PT. Raja Grafindo Persada.. Sukirno, S. (2006) Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan). Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sukirno, S (2016).Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, Edisi Ketiga. Sukirno, S (2017). "Makroekonomi Teori Pengantar". Jakarta: Rajawali Press, Edisi Ketiga.
- Suparmoko, M., & Sofilda, E (2016): " Pengantar Ekonomi Makro". Tangerang: In Media.Edisi kelima.

ISBN 978-623-448-677-3



Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Pondok Karisma Residence
Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya - 085223186009
<http://rcipress.rcipublisher.org/>